



Keberadaan Sub Penyalur Dorong Optimalisasi Program BBM Satu Harga

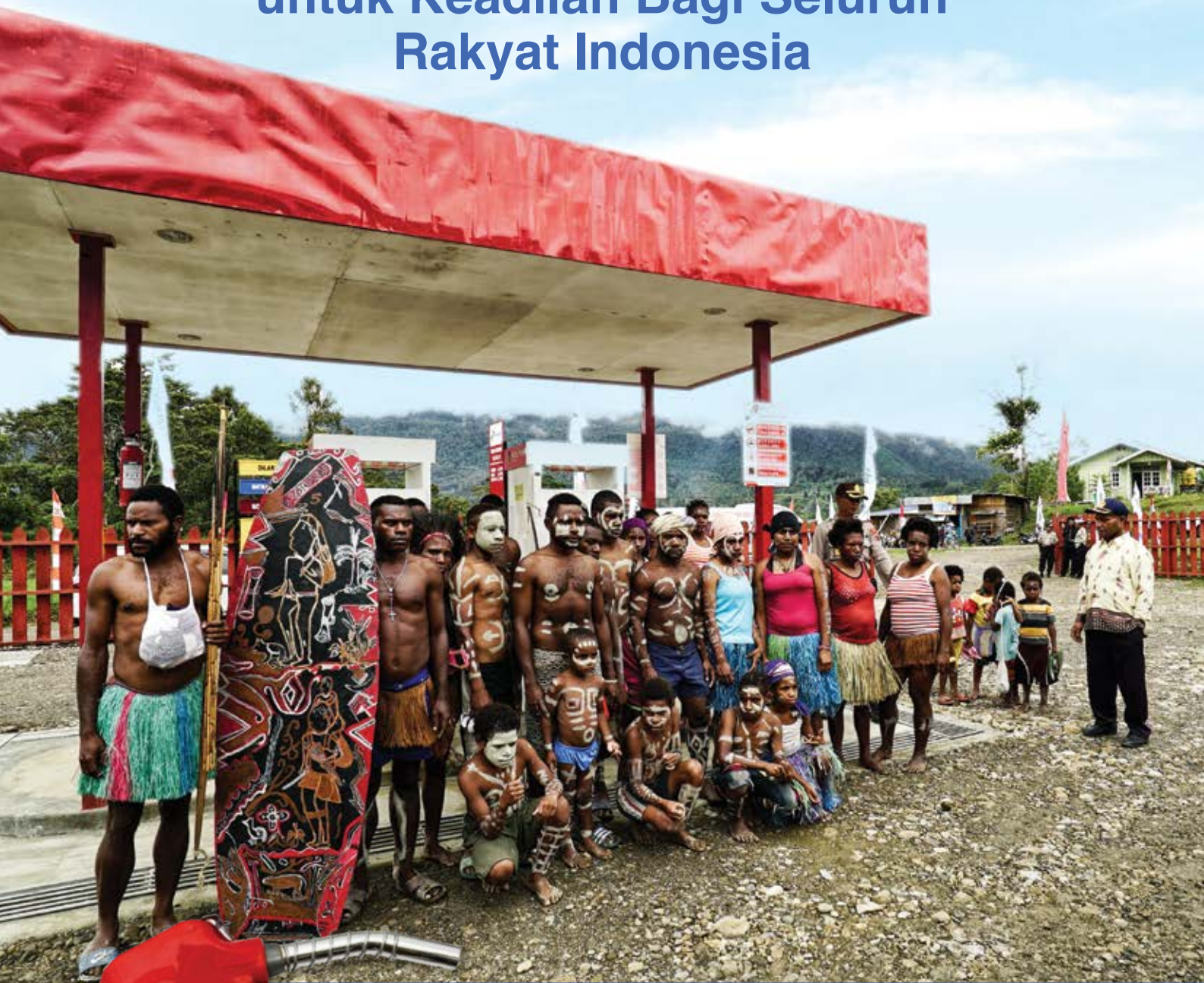
8 >> [sajian utama]
Antusiasme Warga
Sambut BBM Satu Harga

24 >> [beranda]
Konsumen Mulai Pertimbangkan
Kualitas BBM

30 >> [beranda]
Diperketat, Pengawasan
Penerapan Regulasi

BBM Satu Harga

untuk Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia



Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Sri Purnomo

Wakil Pimpinan Redaksi

Daman

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

I Ketut Gede Aryawan,
Idham Baridwan
I Gusti Suarnaya Sidemen,
Bukhori Muslim, Anwar Rofiq

Editor

H Joko Kristadi, Bagja Ramahtullah,
Yosef G

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Narita

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



Keberadaan Sub Penyalur Dorong Optimalisasi Program BBM Satu Harga

Penerapan Program BBM Satu Harga makin meluas. Titik-titik penyalur BBM di berbagai wilayah, khususnya daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) terus bertambah. Meski begitu, penerapan Program BBM Satu Harga masih bisa dioptimalkan. Caranya bisa melalui sub penyalur BBM.

Pembentukan sub penyalur BBM harus didukung berbagai pihak karena sangat signifikan dalam mengimplementasikan penerapan BBM satu harga secara nasional. Dukungan ini, sebagai contoh, sudah ditunjukkan oleh BPH Migas. Sosialisasi sub penyalur ke sejumlah wilayah adalah wujud konkretnya.

Harga BBM di wilayah NKRI memang harus sama alias satu harga. Namun, dalam pelaksanaannya selama ini, masih terkendala di kawasan 3T karena berbagai faktor antara lain pendistribusian dan ketersediaan. Maka, tak heran bila perwujudan BBM satu harga ke masyarakat pengguna di kawasan 3T belum optimal. Untuk mendapatkan BBM, sebagian warga di kawasan 3T masih harus mengeluarkan uang yang banyak lantaran jauhnya jarak lokasi SPBU.

Selain dapat mendukung Program BBM Satu Harga, keberadaan sub penyalur juga dapat menjadi peluang bisnis masyarakat yang ingin berusaha di bidang Migas. Namun, masyarakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu bila ingin membentuk sub penyalur, seperti surat keputusan pemerintah daerah setempat yang menetapkan tim penunjukan sub penyalur, besaran volume dan ongkos angkut dari penyalur ke sub penyalur, serta standarisasi teknis peralatan sub penyalur. Syarat-syarat ini bukan bermaksud membatasi 'ruang gerak' masyarakat, tapi untuk memastikan peruntukan BBM tepat sasaran.

Hal ini karena sub penyalur merupakan sub perwakilan dari kelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan jenis khusus (Premium) yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM khusus untuk anggota. Dengan kata lain, sub penyalur berfungsi sebagai penyalur BBM subsidi resmi di wilayah yang belum ada SPBU. Hanya, sistem penyalurannya masih bersifat tertutup karena tidak dijual eceran. Hal ini juga berarti sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Isi



08-09

[sajian utama]
Antusiasme Warga
Sambut BBM Satu
Harga

BPH Migas meresmikan tiga penyalur program BBM satu harga yang dipusatkan di Kabupaten Asmat, Papua; Kabupaten Nias, Sumatera Utara; dan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kamis (2/8/2018). Penandatanganan prasasti peresmian ini dilaksanakan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Direktur Infrastruktur Migas Alimudin Baso, Anggota Komisi VII DPR-RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, dan Manajer Retail Pertamina Fanda Chrismianto.

6 [sajian utama]
 Sub Penyalur Dapat Menjadi Solusi Efektif Dalam Penyaluran BBM

8 Antusiasme Warga Sambut BBM Satu Harga

11 Sinergi Lintas Sektoral Amankan Pasokan dan Distribusi Energi Selama Lebaran 2018

16 [galeri foto Hilir Migas]

18 [berita foto]

20 [beranda]
 Menyongsong Keterbukaan Data Konsumsi BBM

22 Menuju SPBU Bertaraf Internasional

24 Konsumen Mulai Pertimbangkan Kualitas BBM

26 Memantau Ketersediaan Premium di Jamali

28 Bukan Politis, BBM Satu Harga untuk Menegakkan Asas Keadilan

30 Diperketat, Pengawasan Penerapan Regulasi

32 Kawal BBM Satu Harga, Stop Penyimpangan

32 [ragam]
 Antara Metode Penunjukan Langsung atau Lelang

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



24-25

[beranda]

Konsumen Mulai Pertimbangkan Kualitas BBM

Dalam beberapa bulan terakhir, ada kondisi yang patut dicermati terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM), yakni peralihan konsumsi BBM bersubsidi ke non subsidi dalam skala tertentu. Hal ini tak hanya memiliki korelasi dengan isu lingkungan, namun juga performa kendaraan konsumen itu sendiri.



30-31

[beranda]

Diperketat, Pengawasan Penerapan Regulasi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kepolisian untuk mengawasi penerapan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Sinergi ini bukan tanpa alasan karena ditujukan untuk terus memperketat pengawasan usaha hilir migas agar tidak kecolongan menerapkan regulasi.



11-15

[sajian utama]
Sinergi Lintas Sektoral Amankan Pasokan dan Distribusi Energi Selama Lebaran 2018

Pemerintah telah membentuk Posko Nasional ESDM untuk memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG selama masa mudik tahun 2018. Dengan menunjuk Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Ketua Tim Posko Nasional ESDM, Tim Posko ESDM melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik, dan antisipasi bencana geologi untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 2018.

36 Banyak Peminat, Jargas Terbukti Tingkatkan Perekonomian Rakyat

38 Skema KPBU, Solusi Percepatan Pembangunan Jargas

40 BPH Migas Konsisten Monitoring dan Sosialisasi Penyaluran BBM

43 [lensa]
 Konsisten Awasi Penyaluran BBM

Pertukaran Data Konsumsi BBM, BPH Migas Gandeng Pemprov Sumse

Peninjauan Sistem Pengaliran Gas Bumi Melalui Pipa Milik Energas

BPH Migas Kirimkan Satu Wakil pada *Young Professional Program*

Rapat Pembahasan Pendahuluan KEM dan PPKF 2019

Kepala BPH Migas Hadiri *27th World Gas Conference*

Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Idul Fitri 2018

Halal Bi Halal Hari Pertama Masuk Kerja Pasca Libur Lebaran

Monitoring Pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Pulau Jawa

Kunjungan ke JIPE

Kunjungan ke TBBM Nilam

Pemantauan BBM Saat Hari-H

Safari Ramadhan ke Tol Fungsional

Pemantauan BBM di Jawa Barat

Komite BPH Migas Menjadi Narasumber Workshop Kendala Penyaluran BBM

Kepala BPH Migas Dampingi Menteri ESDM Pantau Kesiapan BBM di Yogyakarta

BPH Migas Kebut Distribusi Premium

MoU Pertukaran Data Konsumsi BBM

Buka Puasa Bersama

Rapat Kesiapan Posko Nasional ESDM

Forum Diskusi Hukum Hilir Migas dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Sharing Session Mencegah Radikalisme di Sektor ESDM

Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur

Sub Penyalur

Dapat Menjadi Solusi Efektif Dalam Penyaluran BBM

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana untuk menerapkan konsep sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) di daerah yang belum terjangkau SPBU. Langkah tersebut diambil sebagai solusi untuk menggantikan peran Pertamina (pengecer BBM) yang notabene ilegal.

“Tadinya itu kan banyak Pertamina ilegal. Dengan dibuat sub penyalur, kita atur jarak, prosedur operasi standar, dan aturan keselamatannya,” kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (28/8/2018).

Meskipun peralatan yang digunakan mirip dengan yang dimiliki PT Pertamina (Persero), namun Pertamina tidak memiliki standar takaran maupun pengamanan. Keberadaannya pun sebetulnya dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Fanshurullah sendiri berharap konsep sub penyalur tersebut dapat menghilangkan penjualan BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah sendiri akan turun tangan untuk mengatur sub penyalur sehingga dapat menjamin masyarakat untuk mendapatkan BBM secara pasti.

Kebanjiran

Fanshurullah mengatakan, pada tahun ini Pemerintah bersama Pertamina sedang menyiapkan 33 sub penyalur BBM. Sub penyalur ini diadakan mengingat SPBU yang ada di tiap-tiap kota tidak semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan persoalan jarak.

Pria yang akrab disapa Ifan itu menjelaskan, dari 33 sub penyalur sebanyak 16 sub sudah beroperasi. Ke-16 Penyalur tersebut berada di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Papua.



Ifan menjelaskan selain 16 yang sudah dioperasikan. Ada Tiga sub penyalur lagi yang sedang dalam tahap finalisasi. Sedangkan 14 titik lagi sedang dalam masa konstruksi dan perizinan.

Menurutnya dengan adanya sub penyalur ini diharapkan masyarakat yang berada di Indonesia Timur bisa lebih mudah mengakses BBM. Sebab, jarak dan persoalan geografis yang ada saat ini membuat masyarakat masih kesulitan mengakses SPBU.

“Kita koordinasi dengan Pertamina dan Pemda untuk sub penyalur ini untuk menerapkan lokasi. Pemda juga ada beberapa yang kasih penyalur eceran. Kalau sub penyalur ini kita buat tertutup,” ujar Ifan.

Secara keseluruhan, Fanshurullah menyebutkan ada 314 lokasi yang telah mengajukan diri untuk menjadi sub-penyalur ke BPH Migas.

“Kami telah memetakan rasio untuk penyalur di Indonesia, begitu juga dengan rasio jumlah penduduk. Apabila dipaksa

menjadi penyalur, maka tidak akan terbangun. Butuh investasi besar, belum lagi untuk lahan,” jelas Fanshurullah.

Penyalur BBM di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu bisa menjadi rujukan. Kehadiran SPBU Kompak ini sejak akhir tahun lalu bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Indonesia sehingga bisa menikmati harga BBM seperti di Jawa. Mereka yang sebelumnya harus membayar Rp10.000 per liter untuk Premium dan Solar, kini hanya perlu membayar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.

Pengiriman Premium dan Solar ke Pulau Enggano dilakukan sebanyak 30 kilo liter (KL) setiap bulannya. Angka ini mempertimbangkan kebutuhan konsumsi BBM masyarakat Pulau Enggano sebelumnya.

Syarat

BPH Migas mendorong masyarakat, terutama yang memiliki badan usaha

untuk menjadi sub penyalur BBM subsidi, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Pasar untuk hal ini terbuka mengingat akses masyarakat terbatas untuk menjangkau BBM di tingkat penyalur.

Selama ini, mereka mengandalkan pengecer yang memasang harga jauh lebih tinggi daripada harga yang dipatok Pertamina. Dengan adanya sub penyalur, maka BBM subsidi bisa lebih mudah didapatkan dengan satu harga.

Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, sub penyalur akan didirikan di daerah yang tidak terdapat penyalur dengan jarak minimal 5 kilometer dari APMS terdekat dan 10 kilometer dari SPBU terdekat.

"Penyaluran masih sangat terbatas di daerah. Harapan kita sub penyalur ini mendukung percepatan BBM satu harga," ujar Henry di Pontianak, Selasa (4/8/2018).

Henry mengatakan, idealnya setiap penyalur dapat menyuplai BBM untuk 6.000 orang. Sementara itu, di Kalimantan Barat, sebagai contoh, rasionya 280 penyalur berbanding 5 juta penduduk. Oleh karena itu, BPH Migas berharap kelompok masyarakat setempat memiliki kemauan menjadi sub penyalur agar BBM subsidi mudah terjangkau dan harganya tidak melonjak tinggi.

Adapun persyaratan pra implementasi sub penyalur, yakni dikeluarkannya surat keputusan Bupati yang menetapkan tim penunjukkan sub penyalur, besaran volume dan ongkos angkut dari penyalur ke sub penyalur, serta standarisasi teknis peralatan sub penyalur.

Jika ingin menjadi sub penyalur, berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

- Memiliki kegiatan usaha atau unit usaha.
- Lokasi memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan.
- Memiliki tempat penyimpanan BBM maksimal 3.000 liter.
- Memiliki dan menguasai alat angkut BBM.
- Memiliki peralatan penyaluran yang sesuai standar teknis.
- Memiliki izin lokasi dari Pemda.
- Jarak minimal 10 kilometer dari SPBU dan 5 kilometer dari APMS.

Syarat lain yang harus dipenuhi yakni berkomitmen untuk tidak



menyalahgunakan BBM yang disalurkan. Sub penyalur hanya boleh menyalurkan BBM ke anggota unit usahanya.

"Sub penyalur bukan penyalur, maka hanya dibagikan ke anggotanya. Jadi tidak boleh berniaga, hanya boleh dapat kompensasi ongkos angkut yang disepakati," kata Henry.

BPH Migas juga akan terus memantau keberadaan sub penyalur BBM yang telah aktif, seperti terlihat saat Fanshurullah Asa bersama tim melaksanakan monitoring ke dua titik lokasi sub penyalur BBM di pedalaman Kalimantan Barat (ditempuh 3 jam perjalanan speed boat) tepatnya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (23/7).

Perpanjangan tangan

Jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia dapat diperkuat dengan adanya pembangunan lembaga sub penyalur BBM di sejumlah titik tertentu, yang didukung melalui lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Kebijakan ini diambil Pemerintah setelah memahami kondisi geografis yang rumit di sejumlah wilayah sehingga diperlukan perpanjangan tangan penyaluran BBM terutama di daerah 3T.

"Itu para pengecer tak apa-apa, biarkan aja jangan diganggu. Tapi, kalau udah besar kita angkat menjadi sub penyalur jangan dibiarkan mereka sendirian begitu. Makanya, Komisi VII mendorong agar supaya makin banyak sub distributor karena kalau mengandalkan distributor saja tidak cukup mungkin kita butuh 100 sub penyalur. *Insya Allah* bisa mencukupi kita lagi hitung," ujar Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kegiatan

Sosialisasi Implementasi Penyalur Khusus (Sub Penyalur) dalam rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga Secara Nasional di Hotel Maqna Provinsi Gorontalo, Kamis (20/9).

Sementara itu, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar mengungkapkan, sub penyalur berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari penyalur BBM. Sub penyalur ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi peluang usaha.

"Sub-penyalur ini investasinya tidak sampai Rp50 juta. Tapi mereka (masyarakat) bisa berdagang, katakan 500-1.000 liter dalam sehari. Ini enam orang bisa bergabung jadi satu modal. Ini peluang usaha," tuturnya di sebuah kesempatan.

Meski begitu, Ibnu menjelaskan, penetapan ongkos angkut ini tetap diatur di bawah keputusan Pemerintah Daerah (Pemda). Ini juga berlaku pada penetapan lokasi serta penunjukan koordinator untuk sub-penyalur BBM itu sendiri.

"Pemerintah buat program ini supaya mereka bisa berjualan tetapi tetap legal. Namun izin lokasinya dimana serta siapa kordinatornya itu semua Pemda yang mengatur," ujar dia.

"Termasuk izin sub-penyalur dan penetapan ongkos angkut ini. Jadi ongkos angkutnya juga bukan kita yang nentuin, Pemda yang buat," tambah dia.

Ibnu menambahkan, kebijakan Pemerintah ini sebagai upaya pencegahan terhadap penyelewengan maupun pengoplosan BBM bersubsidi yang terjadi di lapangan.

"BBM subsidi ini harus tepat sasaran karena sudah diatur juga dalam undang-undang siapa saja yang berhak menerima. Jadi sub-penyalur ini harapannya bisa jadi cikal bakal lembaga penyalur," ujar dia. ★

Antusiasme Warga Sambut BBM Satu Harga

BPH Migas meresmikan tiga penyalur program BBM satu harga yang dipusatkan di Kabupaten Asmat, Papua; Kabupaten Nias, Sumatera Utara; dan Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kamis (2/8/2018). Penandatanganan prasasti peresmian ini dilaksanakan oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Direktur Infrastruktur Migas Alimudin Baso, Anggota Komisi VII DPR-RI Tjatur Sapto Edy, Bupati Kepulauan Sula Hendrata Theis, dan Manajer Retail Pertamina Fanda Chrismianto.



Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional, Pemerintah memberi amanat kepada BPH Migas sebagai Badan yang ditugasi untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama.

BUKTI

BBM satu harga ini adalah bukti begitu besarnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakatnya. Selain itu, dalam implementasi program BBM satu harga di Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nias ini, BPH Migas berharap setiap pihak antara lain pemerintah daerah, pengusaha, dan PT Pertamina (Persero) dapat bekerja sama

dan berkoordinasi dengan baik dalam menciptakan sistem yang dapat memudahkan masyarakat agar mudah mendapatkan BBM secara adil.

Untuk tahun ini, target penyalur BBM satu harga sebanyak 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina dan enam penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk. Realisasi sampai hari ini, termasuk penyalur BBM satu harga Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nias, telah beroperasi 11 penyalur BBM satu harga. Sedangkan pada tahun 2019, ditargetkan 29 penyalur beroperasi.

Fanshurullah mengatakan, dengan terbangunnya SPBU Kompak di ketiga wilayah di atas diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ketiga wilayah itu sendiri terdiri atas 353.871 jiwa. Sebuah angka yang tidak sedikit bila dikaitkan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial.

INFORMASI :

1. Titik penyalur kab.Asmat berada di distrik Fayit.
-/+ berpenduduk 94.227 jiwa di Kab. Asmat
Harga sebelum berkisar Rp 20.000,- sampai Rp 40.000,-/liter menjadi Rp 6.450,-/liter
2. Titik Penyalur Kab Sula berada di desa waiboga, sulabesi tengah.
-/+ berpenduduk 132.524 jiwa di Kab Sula.
Harga sebelum Rp 15.000,-/liter menjadi Rp 6.450,-/liter
3. Titik Penyalur di Kab Nias berada di desa Somi, Gido.
-/+ berpenduduk 127.120 jiwa di Kab Nias
Harga sebelum Rp 8.000,-/liter mejadi Rp 6.450,-/liter

MENDORONG

Program BBM satu harga memang harus digalakkan di pelosok daerah. Program ini bukan hanya menghilangkan disparitas harga BBM yang tinggi, tapi juga berhasil mendorong laju perekonomian di wilayah itu.

Yuspin Prihatin, pendatang dari Klaten, Jawa Tengah yang kini menetap di Merauke, Papua salah satu buktinya. Ia tak menyangka usaha ternak ayam berkembang pesat dengan omset hingga Rp300 jutaan per



bulan. Padahal, usaha itu dirintis hanya "pelarian" karena cita-citanya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dari jalur honorer tak terwujud.

Kesuksesan usaha peternakan itu tak terlepas dari program BBM satu harga yang menyasar Merauke dan kabupaten lain di sekitarnya. Program yang digalakkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu berhasil menurunkan harga BBM yang terkadang mencapai Rp50.000 per liter menjadi normal, seperti di kota-kota di Pulau Jawa. Selain itu, pasokan BBM juga semakin lancar dan stabil.

Walhasil, rintisan usaha ternak Yuspin diikuti rekan-rekan lainnya. Yuspin yang awalnya hanya beternak ayam, berhasil mengembangkan usaha jual beli peralatan ternak.

"Di Papua, ternak ayam dan BBM saling berkaitan. Kami sangat butuh minyak tanah untuk memberi suhu panas bagi anak-anak ayam," jelas Yuspin.

Sebelum ada BBM satu harga, minyak tanah di Merauke bisa mencapai Rp20.000 per liter. Untuk mendapatkannya pun susah karena sering terjadi kelangkaan.

"Sekarang di agen maupun SPBU sama Rp3.300-Rp3.500 per liter," papar Yuspin.

Ade Syahputra, pendatang dari Jakarta Selatan yang sudah menjadi warga Timika, Papua juga bersyukur BBM satu harga menjadikan biaya hidup semakin murah.

"Dulu bayar ojek untuk berangkat kerja yang hanya dua kilometer, harus bayar Rp20.000, sekarang hanya Rp5.000," terang Ade.

Untuk mendapatkan jasa ojek juga semakin mudah. Sejak harga BBM di Timika sama dengan di Jawa, jumlah tukang ojek kian banyak.

"Sekarang biaya hidup lebih murah, harga barang stabil, sama seperti di Jakarta. Orang-orang mulai berani kredit motor atau punya dana lebih untuk hal lain," ungkap Ade.

Warga Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, juga merasa sangat bersyukur atas kehadiran program BBM satu harga di wilayahnya yang belum lama ini diresmikan. Betapa tidak? Kini, warga Kabupaten Sula

dapat menikmati BBM Premium dengan harga Rp6.450 per liter dan Solar seharga Rp5.150 per liter.

"Tentunya, hal ini akan meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan dalam membeli BBM," kata Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes.

Kabupaten Kepulauan Sula terletak paling Selatan di wilayah Maluku Utara. Jarak dari Kota Ternate, ibukota provinsi sekitar 284 km dapat ditempuh melalui penerbangan udara dan pelayaran laut.

Seperti umumnya wilayah Kepulauan Maluku, Sula merupakan daerah pertanian, khususnya perkebunan. Hasil kebunnya, antara lain kelapa, cengkeh, pala dan kakao. Selain itu juga produk tanaman pangan seperti padi ladang, ubi kayu, dan ubi jalar.

Selain berkebun, masyarakat Sula juga bekerja sebagai nelayan. Dengan luas lautan mencapai kurang lebih 14.500 km² atau 60% dari total wilayahnya dan secara geografis mengelilingi wilayah-wilayah daratannya. Bisa dikatakan, kabupaten ini menyimpan potensi perikanan yang cukup besar.

AKSES ENERGI

Sementara itu di tempat terpisah, Anggota Komisi VII DPR RI Tamsil Lindrung mengatakan, program BBM satu harga yang diinisiasi Pemerintah Jokowi-JK harus didukung oleh semua kalangan. Pasalnya, BBM satu harga berperan mewujudkan energi berkeadilan dan memberikan akses energi kepada masyarakat kurang mampu.

Selain itu, program BBM satu harga disebut-sebut juga bakal memberikan akses keterjangkauan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) yang selama ini belum tersentuh BBM.

"Teruskan BBM satu harga, tidak ada alasan untuk dihentikan karena Pemerintah mau menciptakan energi berkeadilan untuk semua," ujarnya di Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (14/8/2018).

Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh oknum tertentu terhadap distribusi BBM satu harga di berbagai daerah, maka diperlukan adanya pengawasan yang bijak dari semua pihak. Selama ini Tamsil mengaku, pengawasan yang dilakukan

pemerintah baik DPR maupun BPH Migas sudah sangat bagus dan harus terus ditingkatkan.

"Bagus untuk pengawasan DPR melakukan pengawasan dan Pemerintah punya lembaga sendiri untuk pengawasan melalui BPH Migas. Bahkan bukan hanya pengawasan, tapi juga memberikan solusi," tambahnya.

Ekonom Institute for Development Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara menilai, program BBM satu harga berhasil mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan Indonesia bagian timur. Salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat Indonesia timur yang meningkat. Hal itu tercermin dari angka inflasi yang tingginya.

"Sebelum ada BBM satu harga, pengeluaran masyarakat di Indonesia bagian timur untuk membeli BBM menggerus pendapatan secara signifikan. Tapi setelah adanya persamaan harga secara nasional, khususnya Premium, uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli BBM dialokasikan untuk menabung atau kebutuhan lainnya," jelas Bhima.

Relokasi belanja masyarakat ini akan memicu pertumbuhan sektor lain, seperti makanan minuman, ritel hingga perumahan. Penurunan biaya logistik akibat BBM satu harga juga berimbas pada naiknya aktivitas ekonomi di daerah pinggiran.

Secara *output*, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua, misalnya, yang tumbuh hingga 18,1% di triwulan ke II 2018. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5,27%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri mencatat penyalur BBM satu harga hingga semester I 2018 mencapai 64 wilayah. Jumlah itu meningkat pesat dibandingkan Oktober 2017 yang baru mencapai 25 titik.

Pemerintah pun berkomitmen melanjutkan program BBM satu harga hingga mencapai 160 titik pada tahun depan. Tahun ini, target BBM Satu Harga menyasar 73 lokasi. ★



Sinergi Lintas Sektoral Amankan Pasokan dan Distribusi Energi Selama Lebaran 2018

Pemerintah telah membentuk Posko Nasional ESDM untuk memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG selama masa mudik tahun 2018. Dengan menunjuk Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Ketua Tim Posko Nasional ESDM, Tim Posko ESDM melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik, dan antisipasi bencana geologi untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri 2018.

Menyebarkan

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan beberapa tugas yang diemban oleh Tim Posko Nasional ESDM 2018 adalah melakukan pengumpulan data lapangan mengenai BBM, gas, listrik, dan kebencanaan geologi.

"Melakukan evaluasi hasil pengawasan mengenai penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik dan kebencanaan geologi. Serta melakukan penyusunan rekomendasi aksi tanggap darurat penanganan

kelangkaan pasokan BBM, gas, listrik dan penanganan bencana alam," kata Fanshurullah, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Fanshurullah melanjutkan, Posko Nasional ESDM 2018 ini melibatkan beberapa Unit Kerja, antara lain BPH Migas, Badan Geologi Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan, Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (PN), PT Pertagas Niaga, dan PT PLN (Persero).

Posko Nasional ESDM memulai masa kerjanya pada H-15 sampai dengan H+13, yaitu pada 31 Mei 2018 sampai 28 Juni 2018 dengan sistem yang dibagi menjadi 2 shift.

Shift 1 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB dan *Shift* 2 pada pukul 14.00 WIB sampai 19.00 WIB, bertempat di Gedung BPH Migas.

Sebagai bagian tugas Posko Nasional ESDM, BPH Migas melakukan rapat koordinasi dengan GM MOR II Palembang serta mengunjungi TBBM Kertapati, Unit Pengatur Beban di Keramasan (PLN), dan Kilang Minyak Pertamina di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (4/6/2018). Fanshurullah berharap, posko kesiapan satgas dapat berjalan baik sebagaimana sesuai dengan instruksi dari Menteri ESDM untuk menyambut Lebaran tahun ini.

"Kita menyebar ke seluruh Indonesia untuk memastikan posko kesiapan satgas Lebaran ini aman. Di Sumbagsel, *Insyah Allah* aman terkendali. Ini adalah tahun kedua BPH Migas ditugaskan oleh Menteri ESDM untuk koordinasi posko," ujarnya.

Kepala BPH Migas juga menambahkan hal ini sebagai upaya mewujudkan ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Migas Pasal 8 Ayat 2 Nomor 22 Tahun 2001.

Pada hari yang sama, Komite BPH Migas, Ahmad Rizal juga mendampingi Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik DPR RI ke TBBM Kertapati, Palembang.

Tak lama setelah itu, Fanshurullah mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam lawatannya ke SPBU 44-55518 dan Posko Pengamat Gunung Api, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (7/6). Kepala BPH Migas memastikan Tim Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 berjalan lancar sesuai dengan tugas yang diberikan.

"Tim sudah turun sejak 31 Mei hingga 28 Juni nonstop keliling ke seluruh lokasi," kata Fanshurullah.

Terjun langsung

Kepala BPH Migas bersama tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 memang tak

hanya memantau dari 'belakang meja', namun juga turun ke lapangan. Seperti yang terlihat saat Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 mengunjungi sejumlah lokasi di Jawa Barat, Minggu (10/6/2018). Kunjungan kerja ini guna memantau kesiapan pendistribusian BBM jenis Premium menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Perjalanan dimulai dengan kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada SPBU 34-40332 yang sudah tiga minggu tidak beroperasi. Setelah itu, bergeser untuk mengecek persiapan Pertamina di Lingkar Selatan Garut sebagai jalur perlintasan bagi masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran.

Selanjutnya, SPBU Reborn Premium 34.44113 Garut dikunjungi untuk mengecek kesiapan pendistribusian BBM bagi masyarakat. Lalu, Kepala BPH Migas mengecek langsung ke SPBU 34.44110 di Kecamatan Cikajang yang berjarak sekitar 29 km dari Kota Garut. Menariknya, laporan tim di lapangan menyebutkan bahwa SPBU ini melayani pembelian Peralite dengan memakai dirijen/alat tampung sementara dengan ditujukan untuk dijual



kembali secara eceran. SPBU ini pun belum mendistribusikan Premium bagi masyarakat sekitar. Kepala BPH Migas akan menindak secara tegas kepada para pelaku usaha yang tidak menuruti aturan yang telah diberlakukan.

Pada kesempatan lain, Komite BPH Migas M Ibnu Fajar menyusuri SPBU dari Kabupaten Sukabumi sampai Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/6/2018). Didampingi oleh Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018, kunjungan ini guna meninjau kesiapan sektor energi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Fanshurullah bersama tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 juga melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan kunjungan lapangan terkait kesiapan sektor energi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Jawa Tengah. Pada Selasa (12/6/2018), Fanshurullah mengecek langsung ketersediaan Premium di SPBU 4450109, Semarang, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas dan tim melanjutkan perjalanan untuk meninjau kios BBM kemasan PT AKR di Rm Barokah Pantura,

Kiosk BBM PT AKR Corporindo, Tbk di exit Tol Gringsing, Kendal, Jawa Tengah. Pada hari yang sama, Kepala BPH Migas beserta tim meninjau proyek pembangunan Jembatan Kali Kuto yang sudah dilewati per tanggal 13 Juni 2018. Tim berlanjut mengunjungi kios-kios BBM milik PT Pertamina (Persero) di sepanjang *rest area* Tol Batang-Semarang. Esok harinya, Kepala BPH Migas beserta tim melakukan Safari Ramadhan melalui perjalanan darat Semarang-Surabaya guna memastikan ketersediaan BBM di *rest area* sepanjang ruas tol fungsional Salatiga-Kartasura berlanjut di ruas Tol Solo-Kartosono-Surabaya.

Kemudian, setelah melaksanakan sholat led, Jumat (15/6/2018), Fanshurullah terbang ke Pontianak dan memantau kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di ibukota Kalimantan Barat tersebut. Tim BPH Migas melanjutkan pemantauan stok BBM di Terminal PT AKR Wajok Kalimantan Barat. Data stok di tangki penyimpanan AKR terakhir menunjukkan stok BBM RON 92 sebesar lebih dari 1.100 KL dan BBM Solar lebih dari 12 ribu KL dan cukup untuk memenuhi kebutuhan

PSO dan industri umum lebih dari 17 hari mendatang.

Keesokan harinya, bersama Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018, Fanshurullah melaksanakan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di TBBM Nilam PT AKR Corporindo, Tbk yang berada di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/6/2018). Setelah itu, Kepala BPH Migas dan tim melanjutkan monitoring dan langsung mengunjungi SPBKB Duduk Sampeyan 1026007 milik AKR di Gresik untuk meninjau SPBKB dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setempat pada H+1.

Lalu, pada Selasa (19/6/2018), Kepala BPH Migas dan rombongan melakukan kunjungan ke Kios Pertamina Rest Area 407 Tol Batang-Semarang, dilanjutkan ke KM 344 Candi Areng Batang. Kepala BPH Migas memastikan distribusi BBM saat arus balik mudik tetap terjamin pasokannya.

Keesokan harinya, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar bersama Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melaksanakan monitoring pasca hari raya Idul Fitri 1439





H yang bertempat di Pandeglang, Jawa Barat. Pada hari yang sama, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan bersama dengan Sekretaris BPH Migas Moh. Hidayat serta tim melaksanakan monitoring pasca hari raya Idul Fitri 1439 H bertempat di Kiosk BBM lokasi Tol Surabaya- Mojokerto, rest area KM 678B.

Terkendali

Bertempat di Gedung BPH Migas, Tim Posko Nasional ESDM melaporkan hasil kegiatan Posko Nasional ESDM selama periode Idul Fitri tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 atau H+13 Idul Fitri.

Dalam pelayanan BBM, Tim Posko Nasional ESDM melaporkan bahwa selama periode Idul Fitri kemarin stok BBM berada dalam kondisi aman. Terjadi peningkatan pendistribusian BBM jenis bensin/gasoline sebesar 12% dari rata-rata pendistribusian normal.

“Premium kenaikannya 23%, Pertalite kenaikan 6%, kemudian Pertamina itu ada kenaikan 13%,” terang Komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar pada konferensi pers Pelaksanaan Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/6).

Sementara itu, untuk BBM jenis *gasoil*/solar terjadi penurunan pendistribusian sebesar 8% dari rata-rata pendistribusian normal. Dengan rincian Solar/Akrasol turun 8%, Dextrite turun 6% dan Pertamina Dex turun 1%.

“Jadi kalo *Gasoline* naik, Solar-nya turun, ini biasa terjadi di setiap Hari Raya karena memang aktivitas produksi di industri turun,” tambah Ibnu.

Sementara itu, untuk BBM jenis Avtur, Tim Posko Nasional ESDM melaporkan terjadi peningkatan pendistribusian Avtur 1,26% yang terjadi pada H-7 Idul Fitri sebesar 16 ribu KL atau meningkat 7,9%. Peningkatan ini terjadi di bandara-bandara utama yaitu, Soekarno Hatta

di Banten, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya dan Adi Sucipto di Yogyakarta.

Dalam meningkatkan pelayanan penyaluran BBM kepada masyarakat pada arus balik, Posko Nasional ESDM juga menyediakan tambahan sarana penunjang di jalur-jalur lintas Jawa dan Sumatera yang terdiri dari Kiosk Kemasan dengan total 72 titik, Motor Kemasan sejumlah 283 unit, Mobile Dispenser 32 unit, Kantong BBM SPBU sejumlah 117 titik, dan Serambi Pertamina dengan total 13 titik.

Pada kesempatan yang sama, Ibnu juga menjelaskan bahwa stok LPG selama periode Idul Fitri kemarin tercatat dalam kondisi aman. Ada peningkatan pendistribusian LPG untuk rumah tangga sebesar 4,4% dari rata-rata pendistribusian normal dengan total realisasi sebesar 563.580 MT. Puncak realisasi LPG untuk rumah tangga terjadi pada H-2 sebesar 27.074 MT.

Kondisi penyaluran gas untuk Jargas dan BBG PGN berada dalam kondisi terlayani dengan baik. Penyaluran gas untuk Jargas PGN (Jakarta, Tangerang, Bogor, Cirebon, Palembang, Lampung, Surabaya, Blora, Semarang, Tarakan, Sorong, dan Batam) dilaporkan mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan kondisi penyaluran gas jargas pada bulan sebelumnya.

Untuk sektor kelistrikan, secara umum kondisi kelistrikan nasional dilaporkan berada pada kondisi aman dan normal. Beban puncak nasional tertinggi terjadi pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar 35.086 MW dan beban puncak nasional terendah

terjadi pada tanggal 15 Juni 2018 sebesar 24.243 MW.

“Untuk kondisi pasokan listrik ini *Alhamdulillah* aman. Tidak terjadi *unpredictable situation*, seperti total *shutdown* atau lainnya. Jadi kondisinya aman,” jelas Ibnu.

Terkait antisipasi bencana geologi, tercatat pada periode Idul Fitri Tahun 2018 kemarin telah terjadi 15 gempa bumi dengan magnitudi 4,2–5,7 yang tidak berpotensi tsunami. Namun, terdapat gempa bumi merusak yang terjadi di daerah Sumenep dan sepanjang Pantai Sarmi Papua yang

menimbulkan korban luka ringan dan puluhan rumah rusak berat maupun ringan.

Untuk status gunungapi, Tim Posko Nasional ESDM menjelaskan terdapat satu gunungapi dengan status awas (G. Sinabung), satu gunungapi status siaga (G. Agung), dan 49 gunungapi dengan kondisi normal. Sedangkan untuk bencana tanah longsor, tercatat terjadi 21 gerakan tanah di 19 kabupaten/kota dalam 12 provinsi yang berdampak pada lalu lintas terhambat, 13 rumah rusak, sekitar 50 warga mengungsi, dan listrik putus di Toraja. ★





galeri foto **Hilir Migas**

★ | Kunjungan Kepala BPH Migas ke Kantor Pertamina Palembang Sumatera Selatan, 6 Juni 2018



★ | Seminar Nasional Himpunan Mahasiswa Logistik, 23 April 2018 di Trisakti



Kepala BPH Migas Hadiri
27th World Gas Conference



Bincang Santai di SKK Migas
16 April 2018





Achievement Motivation bagi Pegawai di Lingkungan BPH Migas

BPH Migas menyelenggarakan Acara Achievement Motivation bagi Pegawai di Lingkungan BPH Migas dengan narasumber Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Tahun 2013-2015 pada tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Lt. Ground, Gedung BPH Migas Jakarta.



BPH Migas melakukan kunjungan ke Lumajang, Jawa Timur

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi dari BPH Migas Mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, BPH Migas melakukan kunjungan ke Lumajang, Jawa Timur, pada 24 Juli 2018, untuk sosialisasi kepada masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah.



Rapat Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi T.A 2018

Solo – BPH Migas menyelenggarakan Rapat Kerja T.A 2018 yang bertempat di Hotel Syariah Hotel Solo pada tanggal 19 - 21 Juli 2018. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat secara detail program-program serta penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan oleh BPH Migas selama 1 semester pada tahun 2018 serta mengevaluasi kinerja masing-masing unit internal BPH Migas pada semester 1 tahun 2018.



Komite BPH Migas Dampingi Menteri ESDM Awasi Penyalur BBM Satu Harga di Tambraw

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dan Komite BPH Migas Henry Ahmad menghadiri Rapat Kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI yang dilaksanakan hari ini (19/7) bertempat di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1.

Adapun agenda Raker kali ini membahas beberapa hal, antara lain:

1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017.
2. Membahas Rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2018-2037.
3. Membahas Progres Subsidi BBM dan LPG Tahun 2018 dan Proyeksi hingga akhir tahun 2018.
4. Membahas Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
5. Lain-lain.



Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Idul Fitri 2018 di ASDP Merak

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar dan Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 Melakukan Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Idul Fitri 2018 di ASDP Merak (21/6). Rangkaian kegiatan Monitoring dimulai dengan melaksanakan Rapat bersama Jajaran GM. ASDP Merak, ASDP Pusat dan SE Inmar PT Pertamina. Setelah itu, Komite BPH Migas didampingi SE Inmar Pertamina dan Staf ASDP Melakukan Pengecekan Lapangan Sarana Flometer BBM Di ASDP Merak.



Monitoring Pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 H bertempat di Kiosk BBM lokasi tol Surabaya

Komite BPH Migas, Sumihar Panjaitan bersama dengan Sekretaris BPH Migas, Moh. Hidayat serta tim melaksanakan Monitoring Pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 H bertempat di Kiosk BBM lokasi tol Surabaya - Mojokerto, rest area KM 678 B



Menyongsong Keterbukaan Data Konsumsi BBM



Kamis (7/6), BPH Migas resmi menandatangani MoU Pertukaran Data Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Nota kesepahaman pertukaran data konsumsi BBM ini diharapkan dapat mendorong Badan Usaha migas yang beroperasi di Sumsel untuk transparan dalam menyajikan data konsumsi BBM di daerah ini.

Melalui pertukaran data, BPH Migas mengharapkan dapat mengetahui secara riil penggunaan dan produksi bahan bakar pada Badan Usaha migas di Sumsel. Selama ini terdapat ketidaksamaan antara data BPH Migas dengan data Pemprov Sumsel sehingga pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor tidak maksimal.

"Padahal dari 200 Badan Usaha migas yang beroperasi di Indonesia, 23 terdaftar di

Sumatera Selatan. Namun hanya 20 yang memiliki izin operasional," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah, Sumatera Selatan memiliki potensi PBBKB untuk ditingkatkan. Cara peningkatannya, setiap Badan Usaha harus memberikan data yang sebenarnya dan apa adanya baik ke pemerintah daerah maupun BPH Migas.

Percontohan

Sumsel sendiri menjadi daerah percontohan pertukaran data konsumsi BBM. Dengan kata lain, ini adalah sebuah terobosan. Fanshurullah mengatakan, jika percontohan ini berhasil, maka akan juga diterapkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Fanshurullah menambahkan, untuk saat ini saja Indonesia telah memiliki 200 Badan Usaha migas. Sementara, baru 20 Badan Usaha migas yang memiliki izin operasi di Sumsel.

"Pendapatan asli daerah (PAD) kendaraan tahun 2017 ini baru Rp700 miliar. Ini relatif kecil. Makanya, kita minta Badan Usaha ini bisa kasih data apa adanya, berapa mereka jualan," tegasnya.

"Benar tidak volume konsumsi BBM-nya segitu, benar tidak hanya 20 Badan Usaha, kan bisa jadi lebih banyak. Di sinilah BPH Migas akan bantu kasih data," tambahnya.

Pada tahun ini, BPH Migas memperkirakan konsumsi BBM sebesar 75 juta kilo liter (KL). Fanshurullah mengatakan, jumlah itu dibagi



menjadi jenis BBM tertentu (JBT) sekitar 16,2 juta KL untuk solar dan minyak tanah, jenis BBM khusus penugasan (JBKP), dan jenis BBM umum (Premium, Peralite, Pertamina) sekitar 51,3 juta KL.

Jenis BBM tertentu yakni bensin jenis solar dan minyak tanah, BBM khusus penugasan adalah bensin dengan RON 88 atau Premium dengan harga khusus ditetapkan pemerintah. Sementara jenis BBM umum adalah bensin non subsidi mulai dari Oktan 88 ke atas.

Dari jumlah itu, PT Pertamina (Persero) mengelola sekitar 79% dari total kuota BBM nasional sepanjang tahun ini yang terdiri dari 15,9 juta KL untuk solar dan minyak tanah, dan Premium khusus untuk luar Jawa, Bali dan Madura sebanyak 7,5 juta KL.

Dongkrak pendapatan daerah

Terkait keterbukaan data konsumsi di atas, BPH Migas menyatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel bisa meningkat dengan adanya keterbukaan informasi data konsumsi

BBM. Alasannya, dengan adanya keterbukaan tersebut pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bisa diketahui dengan tepat.

“Dengan PBBKB bisa saja sampai Rp2 triliun,” jelas Fanshurullah di Palembang, Kamis (7/6/2018).

Namun untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah Badan Usaha yang menjadi penyalur migas di Sumatera Selatan harus melaporkan data konsumsi minyak dan gas kepada BPH Migas dengan benar.

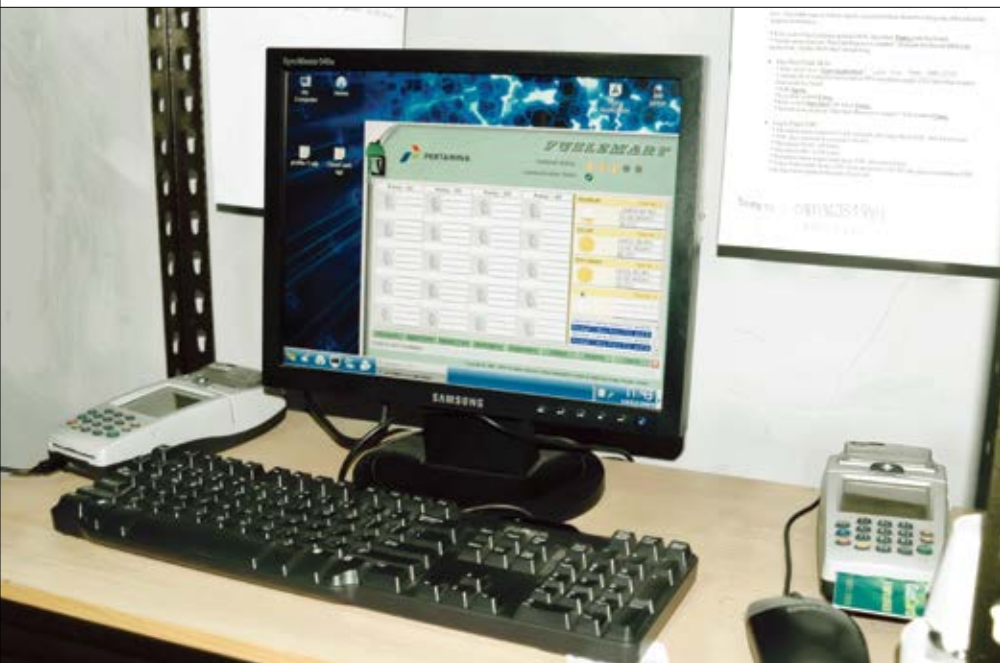
“Badan Usaha migas yang ada di Sumsel ini tidak boleh bohong, mereka mesti kasih data ke BPH Migas dan Pemda apa adanya, berapa jualnya,” tambah dia.

“Ini komitmen kami memajukan daerah, kalau ini berhasil akan menjadi percontohan bagi daerah lain. Selain kesepakatan ini, kami akan mengawal pembangunan pipa gas dari Palembang sampai Muntok,” ujarnya.

Menjadi daerah yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam tak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduknya. Sejumlah kota dan kabupaten yang dikenal sebagai daerah kaya minyak justru masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi dengan indeks pembangunan manusia masih rendah.

Berdasarkan data dana bagi hasil migas 2016 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan dapat diketahui bahwa daerah kaya migas didominasi oleh wilayah di provinsi Riau dan sebagian kecil dari Sumatera Selatan. Lainnya tersebar di provinsi Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Setidaknya, terdapat hampir 20 kabupaten yang setiap tahunnya memperoleh jatah dana bagi hasil lebih dari Rp100 miliar. Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur merupakan kabupaten dengan dana bagi hasil migas terbesar di Indonesia. Tak kurang dari Rp728 miliar masuk ke APBD kabupaten tersebut. Selanjutnya, posisi kedua dan ketiga diisi oleh Kabupaten Bengkalis (Riau) dan Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) dengan dana bagi hasil masing-masing sebesar Rp723 miliar dan Rp641 miliar. ★



Menuju SPBU Bertaraf Internasional



Layanan prima

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, dalam regulasi tersebut, BPH Migas akan memberikan standarisasi keamanan, kesehatan, dan lingkungan di setiap SPBU dan terintegrasi di mana saja SPBU berada.

"Mengacu standarisasi internasional, semua harus sama," ujar Fanshurullah, Jumat (15/6/2018).

Standar ini berlaku tak hanya untuk SPBU-SPBU dengan pengelola Pertamina, tetapi juga dengan swasta, seperti AKR. Menurut Fanshurullah, dengan standarisasi internasional ini, semua SPBU akan bersaing memberikan layanan prima pada masyarakat.

Namun, untuk menetapkan standar SPBU internasional, perlu rapat Komite terdahulu untuk menentukan regulasi atau aturan baku SPBU internasional ini. Kalau regulasi ini berlaku, bisa saja BPH Migas tidak memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada SPBU berstandar internasional.

"Tapi, kapan pelaksanaan proses standarisasi ini, pasti akan mengarah ke sana," Fanshurullah menambahkan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menyusun regulasi standarisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertaraf internasional. Wacana tersebut akan digodok dalam waktu dekat ini.

Digitalisasi

Selain itu, BPH Migas bersama PT Telkom dan PT Pertamina (Persero) telah menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi tiap *nozzle* (moncong selang) yang ada di 5.518 SPBU milik Pertamina dari total 7.415 SPBU. Langkah itu untuk mengendalikan BBM bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan (Premium) agar lebih tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan pada rapat koordinasi BPH Migas, PT Pertamina, dan PT Telkom yang diselenggarakan di Gedung BPH Migas, Rabu (12/8/2018). Digitalisasi *nozzle* pada SPBU Pertamina akan memudahkan BPH Migas mengawasi dan mendata semua volume BBM *Public Service Obligation* (PSO) dan Non PSO yang didistribusikan melalui SPBU. Pertamina akan memberlakukan dan memastikan agar sistem digitalisasi ini terbangun pada akhir 2018.

Terkait hal ini, Fanshurullah mengatakan, dirinya sangat optimis bahwa target yang

telah ditetapkan akan tercapai dengan adanya transformasi leadership dan budaya kerja pada pimpinan Pertamina. BPH Migas juga berkomitmen membantu percepatan kalibrasi flowmeter dan tangki timbun dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, Direktur Enterprise and Business Telkom Dian Rachmawan mengatakan, untuk menerapkan sistem digital pada penyaluran BBM, Telkom selaku mitra, akan menempatkan sensor penghitung penyaluran BBM dari tangki pendam yang terdapat pada SPBU sampai keran penyaluran BBM dari dispenser ke kendaraan (*nozzle*).

"Kami akan memasang semua sensor dari tangki penyimpanan, pengisian sampai di *nozzle*," kata Dian.

Dian mengungkapkan, untuk mendukung penerapan sistem digital pada penyaluran BBM, Telkom akan membangun aplikasi dan





jaringan internet, yang dapat menampung dan menyalurkan data.

"Kami juga siapkan *platform* aplikasi pada semua *devices*. Lalu, *network* kami cukup *confident* karena sensor ini bisa dijalankan dengan jaringan yang 3G. Kalau *network* 4G tak ada, tak masalah," katanya.

Senior Vice President Corporate ICT Pertamina Jeffrey Tjahja Indra melanjutkan, data penyaluran BBM dari tangki timbun sampai yang dikeluarkan ke tangki kendaraan akan tercatat secara digital. Kemudian, data penyaluran BBM yang dilakukan masing-masing SPBU ditransfer ke pusat data untuk dilaporkan ke BPH Migas selaku regulator yang menangani penyaluran BBM.

"Digitalisasi ini pada prinsipnya kita melakukan konversi dari jumlah liter yang

disalurkan jadi format elektronik. Format ini dikirim ke satu *data centre*, dari seluruh SPBU ini di-*convert*," katanya.

Data penyaluran dari Pertamina dengan yang disalurkan ke masyarakat akan dicocokkan. Jika terjadi ketidakcocokan, maka selisih akan ditanggung perusahaan.

"Ini kita lihat volume dari *nozzle*. Selisihnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi selisihnya kelihatan," katanya.

Setiap tetes

Selama ini, hanya 200 hingga 400 SPBU yang terawasi secara manual dari sekian ribu SPBU yang ada. Berdasarkan hal ini, BPH Migas mewajibkan penggunaan sistem Teknologi Informasi (IT) di setiap *nozzle* Premium dan Solar di SPBU milik Pertamina. Ini merupakan hasil kesepakatan

tiga menteri agar penjualan dua jenis BBM tersebut tepat sasaran.

Tiga menteri itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Mereka menginginkan setiap tetes penjualan Premium dan Solar terpantau.

Fanshurullah mengatakan, penerapan sistem IT akan dilakukan bertahap, mulai dari SPBU di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Sebagai tahap awal, uji coba digitalisasi pada pipa semprot itu sudah dilakukan di 10 titik Pulau Jawa. "Sepuluh kami uji coba untuk memastikan kesiapan sistemnya," kata Tim Digital Transformasi Pertamina Endriyanto.

Ke-10 titik itu ada di Jakarta, yakni kawasan Fatmawati. Kemudian, Bekasi di Pondok Ungu dan Azalea, Jawa Timur di Sidoarjo, Daerah Istimewa Yogyakarta di Cokro. Lalu dua SPBU di Tol Cipali Jawa Barat. Ada juga dua SPBU di Cipularang, dan satu di Tangerang Selatan, yaitu Rempoa.

Namun, jumlah tersebut akan terus meningkat. Targetnya hingga akhir tahun ini, Pertamina bisa menerapkan digitalisasi di 5.518 SPBU. ★





Konsumen Mulai Pertimbangkan Kualitas BBM

Dalam beberapa bulan terakhir, ada kondisi yang patut dicermati terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM), yakni peralihan konsumsi BBM bersubsidi ke non subsidi dalam skala tertentu. Hal ini tak hanya memiliki korelasi dengan isu lingkungan, namun juga performa kendaraan konsumen itu sendiri.

Dampak penggunaan BBM terhadap lingkungan sudah menjadi isu lama. Isu tersebut kian menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan penurunan dalam penggunaan BBM berkualitas rendah.

Dari Premium ke Peralite

Penurunan tersebut paling kuat dipengaruhi oleh peralihan BBM jenis Peralite dari penggunaan jenis Premium. Gejala ini perlu diapresiasi mengingat sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam menjaga perubahan iklim.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), realisasi penggunaan Premium turun hampir 50% di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Tercatat, Premium di Jamali terserap sebesar 1.037.161.08 kiloliter (kl) pada triwulan pertama tahun 2018.

Bila dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi Premium di wilayah tersebut sanggup mencapai lebih dari 2 juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar Jamali. Pada triwulan I 2018, masyarakat hanya membutuhkan 1,9 juta kl atau turun sekitar 29% dibanding periode sebelumnya, sebesar 2,6 kl.

Akibat kondisi tersebut, Badan Usaha berpotensi secara bertahap mengubah sarana dan fasilitas (sarfas) Premium menjadi Peralite. Salah satu pertimbangan sarfas, tambah Fanshurullah, adalah penyaluran Premium sebagai subsidi BBM hanya ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Ada komitmen Pertamina betul-betul mewujudkan Premium disalurkan kepada yang berhak. Kita apresiasi Pertamina menjaga apa yang sudah diharapkan Pemerintah,” tegasnya.

Margin lebih

Terlebih, perubahan sarfas bagi Badan Usaha berdampak pada segi finansial perusahaan. Mereka beranggapan Peralite dinilai memiliki margin yang lebih baik dibandingkan Premium.

Meski pola perilaku konsumen BBM mengalami perubahan, Pemerintah tetap menjamin ketersediaan BBM jenis Premium. Bahkan, Pemerintah akan memperluas Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tersebut ke wilayah Jamali.

Terkait hal itu, Pemerintah telah menetapkan regulasi baru sebagai dasar payung hukum baru dalam menjalankan tugas tersebut. Fanshurullah mengatakan, Presiden Joko Widodo telah meneken revisi aturan soal kebijakan mengenai penyaluran

BBM jenis Premium di Jamali. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

“Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sudah ditandatangani Presiden,” ucap pria yang akrab disapa Ifan ini

Fanshurullah menilai, peraturan baru diterbitkan sebagai keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat atas kebutuhan BBM jenis Premium.

“Ini masalah keadilan bagi masyarakat kecil,” tegasnya. Ia pun menyatakan komitmen Pertamina menjalankan penugasan JBKP secara bertahap di Jamali.

Selain itu, rencananya, Pemerintah juga akan menambah volume kuota Premium sebesar 5 juta kl dari sebelumnya ditetapkan sebesar 7,5 juta kl sehingga totalnya menjadi 12,5 juta kl. Jumlah tersebut akan mencakup kebutuhan Premium di wilayah Jamali.

Dukungan

Sebenarnya, tanggapan positif datang dari pemerhati lingkungan hidup terkait peralihan konsumsi Premium ke Pertalite. Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Berry Nahdian Furqon mencontohkan, jenis BBM dengan oktan 90 (Pertalite) dan 92 (Pertamax) itu punya dampak positif bagi lingkungan. Terutama, sumbangsih ke udara yang lebih bersih.

“Sangat bagus, itulah kenapa diharapkan peningkatan konsumsinya terus berlanjut,” katanya dalam sebuah kesempatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, oktan Premium yang hanya 88 tidak ramah lingkungan. Selain itu, oktan yang lebih tinggi pada Pertalite dan Pertamax juga membuat mesin menjadi lebih baik. Jadi, pengguna BBM oktan tinggi tidak hanya memberikan sumbangsih untuk lingkungan, tetapi juga merawat kondisi mesin.

“Terus, meningkatnya penjualan (Pertalite dan Pertamax), bisa jadi karena kesadaran masyarakat mulai tinggi untuk menggunakan BBM ramah lingkungan,” terangnya.

Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, sudah saatnya Pemerintah



menghapuskan BBM RON rendah, seperti Premium. Selain tidak sesuai dengan kondisi mesin saat ini, keberadaan BBM RON rendah juga bak “menjual harapan” kepada masyarakat.

“Masyarakat bermimpi bisa berhemat dengan Premium, namun sesungguhnya BBM RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan Premium seperti membohongi diri sendiri. Maka, sebaiknya Pemerintah menghapus saja,” kata Bebin.

Menurut Bebin, mesin kendaraan bermotor keluaran terbaru, memang tidak diperuntukkan bagi BBM RON rendah seperti Premium. Jika dipaksakan, maka akan memunculkan banyak masalah. Karena pembakaran tidak sempurna, maka mesin akan menjadi mengelitik, tenaga berkurang, dan membuat mesin tidak awet.

“Kesannya murah dan hemat, tetapi sebenarnya sangat merugikan pengguna,” kata Bebin.

Itulah sebabnya Bebin menyikapi positif, tren yang sekarang berkembang. Penurunan konsumsi Premium dalam beberapa bulan terakhir, menurutnya, merupakan salah satu indikasi bahwa konsumen sudah mulai cerdas memilih BBM.

Mengenai keunggulan BBM RON tinggi seperti seri Pertamax, Bebin mengibaratkan seperti “makanan bergizi” bagi kendaraan. Kalau BBM yang dipakai berkualitas, maka performa dan keawetan mesin juga sangat terjaga.

Karena itu pula, maka tidak menjadi persoalan ketika kendaraan keluaran lama pun menggunakan Pertamax. “Bahkan, untuk kendaraan tahun 70-an pun tidak masalah. Malah bagus kan. Kan kualitas ‘gizinya’ semakin baik,” lanjut dia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafruddin juga mendukung penghapusan BBM yang memiliki RON rendah. Selain berdampak negatif bagi mesin kendaraan bermotor, BBM RON rendah juga berakibat buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan.

“Karena pembakaran tidak sempurna, maka BBM RON rendah akan menghasilkan emisi sangat tinggi. Selain itu, juga akan menghasilkan karbon monoksida dan nitrogen dioksida yang juga tinggi,” kata Syafruddin.

Bagi kesehatan, kata dia, hidrokarbon sangat berbahaya karena bisa memicu kanker. Sedangkan karbon monoksida bersifat racun dan nitrogen dioksida dapat memicu penyakit paru-paru.

Dari aspek teknis, lanjut Syafruddin, BBM RON rendah juga tidak sesuai lagi dengan standar kendaraan bermotor saat ini. Di tengah kebijakan Pemerintah dalam menerapkan standar emisi Euro-4, ternyata BBM RON rendah pun sudah tidak sesuai bagi standar emisi Euro-2.

Kendaraan dengan standar Euro-2 tersebut, lanjut Syafruddin, minimal memiliki Compression Ratio 9:1. Ambil contoh untuk sepeda motor matik sudah 9,5:1. Bahkan, mobil low cost green car (LCGC) seperti Datsun Go, Datsun Panca, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, pun memiliki rata-rata CR 10:1.

“Untuk kendaraan dengan CR minimal 9:1 tersebut, harus diisi BBM dengan RON minimal 92. Jadi kalau diisi BBM berkualitas rendah, maka kendaraan tersebut akan rusak. Belum lagi, tingkat keborosan yang mencapai 20%,” tegasnya. ★



Memantau Ketersediaan Premium di Jamali

"Saya dapat info semalam dari Pak Menteri ESDM bahwa Presiden telah menandatangani Perpres No. 191 Tahun 2014, mungkin selebihnya nanti Pak Menteri bisa menjelaskan," kata Fanshurullah Asa di Kantor BPH Migas. Dengan sudah ditandatangani Perpres tersebut, Pertamina wajib menjual BBM jenis Premium di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sebelumnya, Pertamina hanya diwajibkan menjual Premium di luar Jamali. Saat ini ada sebanyak 1.900 SPBU dari 3.900 SPBU di daerah Jamali yang tidak lagi menjual Premium, sedangkan tahun sebelumnya hanya 800 SPBU.

Komitmen

Terkait penerapan Perpres di atas, Kepala BPH Migas melakukan kunjungan kerja ke SPBU 33.41201 untuk memastikan ketersediaan Premium. Fanshurullah mengatakan, per hari ini sudah ada enam SPBU milik Pertamina di Jawa kembali menyediakan Premium, terdiri dari dua SPBU di jalan tol dan sisanya berada di jalur non tol.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Revisi tersebut terkait kewajiban penjualan Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Demikian disampaikan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

"Sudah ada (tambahan) enam SPBU. Dua di jalan tol Cipali rest area 102, rest area 101 di jalan tol. (tambahan) 571 (yang menyediakan Premium) bisa secepat mungkin," ungkapnya di SPBU rest area 102, Tol Cipali, Jawa Barat, Jumat (1/6/2018).

Ifan, sapaan akrabnya, menegaskan, penambahan jumlah SPBU penyedia Premium merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyalurkan BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang arus mudik Lebaran.

PT Pertamina (Persero) sendiri menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo mengatakan, tambahan enam SPBU yang menjual Premium ini juga merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk mendukung kelancaran arus mudik.

"Dalam rangka hadapi libur mudik, kita fokus pemudik ini dapat kepastian di seluruh SPBU yang ada di



jalur mudik tersedia Premium. BBM tidak hanya Premium yang kita sediakan. Ada Pertamax, dan lain-lain. Semua kita sediakan," jelas dia.

Saat ini, total volume Premium yang tersedia di keenam SPBU tersebut mencapai 60 KL dengan perhitungan setiap SPBU memiliki kapasitas 10 KL. "Mudah-mudahan penugasan penyediaan Premium maupun bahan bakar dalam rangka mudik bisa berjalan lancar dan tanpa ada halangan," tandasnya.

Pemetaan ulang

Selain itu, Pertamina akan memetakan ulang distribusi BBM di SPBU. Hal ini terkait langkanya pasokan BBM jenis Premium di sejumlah wilayah. Dalam upaya ini, Pertamina menggandeng BPH Migas untuk melakukan konsolidasi data.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kelangkaan Premium di beberapa SPBU disebabkan tidak seimbang antara pasokan dan permintaan masyarakat sekitar. Data yang sudah dipetakan oleh Pertamina tidak cocok dengan kenyataan di lapangan.

"SPBU itu tiba-tiba demand ada kenaikan," kata Nicke di hadapan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu, (25/04/2018). "Kami mengakui ada potensi tidak match datanya," tambahnya.

Harapannya, pemetaan ulang ini dapat mengetahui permintaan riil Premium di tiap SPBU. BPH Migas mulai dari mengecek profil tiap-tiap perusahaan pemilik SPBU.

Pada kuartal pertama kemarin, menurut Nicke, Pertamina telah menyalurkan BBM

berjenis Premium sebesar 90 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Ia meyakini distribusi BBM jenis ini tidak dikurangi, termasuk pasokan selama Lebaran 2018. "Hari ini sangat intens melakukan perencanaan dan stok," ujar Nicke.

Karena kelangkaan Premium ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat melayangkan surat ke Pertamina pada awal bulan ini. Dalam surat itu, Pemerintah menyoroti berkurangnya pasokan bahan bakar beroktan 88 tersebut.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Pemerintah menginginkan Pertamina menyalurkan Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran Premium selama Januari-Maret 2018 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bahkan, langkanya Premium ini menjadi satu dari enam penyebab dicopotnya Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina pada pekan kemarin. Lima faktor lainnya terkait pembentukan induk usaha (*holding*) perusahaan minyak dan gas bumi; tumpahan minyak di Teluk Balikpapan; proyek modifikasi kilang (*Refinery Development Master Plan/ RDMP*) yang belum berjalan optimal; belum beroperasinya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dan kondisi kesehatan. ★



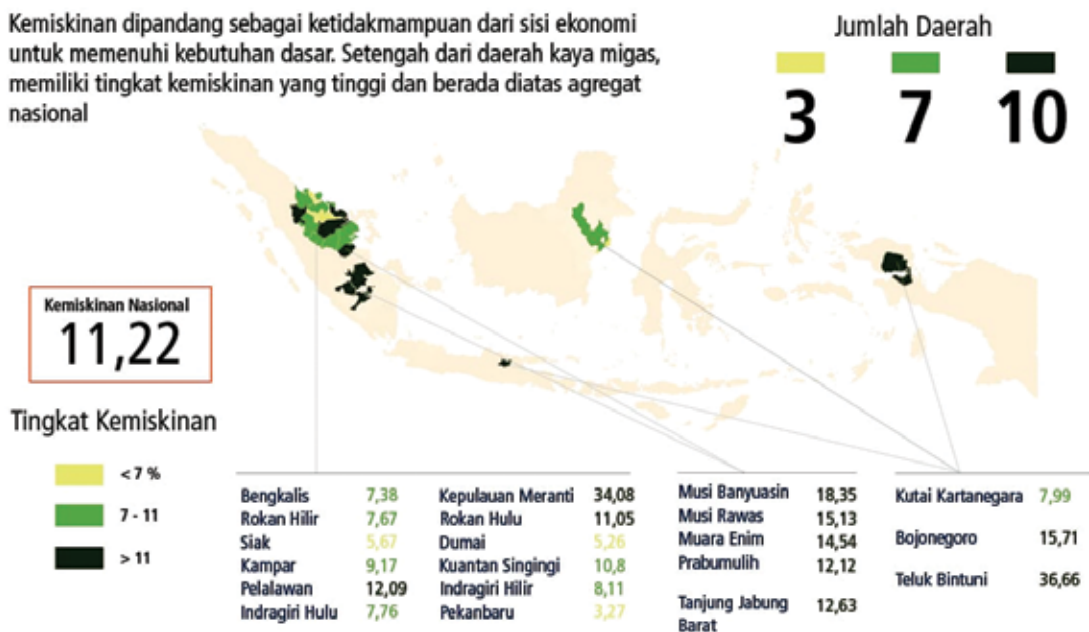
Bukan Politis

BBM Satu Harga untuk Menegakkan Asas Keadilan

Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadikannya komoditas politik. Namun, BPH Migas menegaskan, Program BBM Satu Harga bukan komoditas politik, melainkan dalam rangka menjalankan amanah Pancasila mewujudkan keadilan sosial. Tercatat sudah 59 titik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sudah direalisasikan. Tahun ini ditargetkan 73 titik lagi yang digarap.

POTRET KEMISKINAN 20 DAERAH KAYA MIGAS

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setengah dari daerah kaya migas, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dan berada diatas agregat nasional



"Ini bukan isu politik, tetapi isu keadilan. Ini amanah Pancasila mewujudkan keadilan sosial. Tidak hanya BBM Satu Harga, tapi keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga. Ini menjadi tiga hal yang bersenyawa," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam pertemuan dengan Pimpinan Redaksi di kantornya, Jakarta, Selasa (10/4).

Hak

Fanshurullah menerangkan, BBM Satu Harga ialah program menyalurkan Premium dan Solar bersubsidi dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Pasalnya selama

ini di wilayah 3T belum menikmati harga BBM Rp6.450 per liter untuk Premium dan Rp5.150 per liter untuk Solar. Sebelum ada program tersebut, harga BBM di wilayah 3T bisa naik hingga tiga kali lipat.

"Selama ini, masyarakat yang tinggal di perbatasan, 3T tidak menikmati satu harga. Barangnya (BBM) pun tidak ada. Apakah tega satu bangsa. Mereka juga punya hak," ujarnya.

Dikatakannya, dua Badan Usaha ditunjuk untuk melaksanakan program BBM Satu Harga yakni PT Pertamina (persero) dan PT AKR. Saat ini sudah 59 titik yang digarap

oleh kedua Badan Usaha tersebut. Tahun ini masih ada 73 titik yang harus diselesaikan.

Sekali lagi, BPH Migas menilai program BBM Satu Harga tidak terkait dengan agenda politik. Memang, Fanshurullah menyadari BBM Satu Harga bisa menjadi komoditas politik. Namun, kata dia, dirinya menegaskan masalah ini bukanlah soal politik, namun lebih pada isu keadilan. BPH Migas, katanya, tetap akan mengawasi BBM Satu Harga, meski sedang berlangsung agenda politik besar, seperti pilkada dan pilpres di tahun depan.

"Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi kalau ada bilang BBM Satu Harga itu bohong-bohongan, itu dipertanyakan nilai Pancasila-nya," kata Fanshurullah.

BPH Migas sendiri berkomitmen untuk mewujudkan keadilan pada ketersediaan, distribusi, dan harga energi di seluruh wilayah Indonesia.

Hal senada diungkapkan oleh Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia. Ia menuturkan, pihaknya meyakini program itu tak terkait dengan politik. Dia menuturkan banyak masyarakat yang masih belum menikmati komoditas BBM dengan satu harga.

Dia menuturkan warga seharusnya berterima kasih dengan Presiden Jokowi yang melihat persoalan ketidakadilan pada masalah BBM tersebut. Menurutnya, tak ada persoalan politik dengan BBM Satu Harga.

"Jangan dibawa ke politik, tak ada sama sekali politiknya," katanya. Ia menambahkan, "Kita harus berterima kasih kepada Jokowi yang melihat (masalah ketidakadilan BBM)".

Melanjutkan komitmen

BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk terus memberikan komitmennya dalam merealisasikan target Program BBM Satu Harga. "Sesuai dengan *road map* hingga tahun 2019," ujar Fanshurullah di kesempatan berbeda.

Fanshurullah berharap, Pertamina dapat meneruskan komitmen yang selama ini telah dicetuskan untuk merealisasikan program tersebut untuk mewujudkan sektor energi yang berkeadilan di tanah air. Sepanjang tahun 2017, perusahaan pelat merah itu telah mengoperasikan 54 penyalur BBM di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik.

Sementara pada 2018 ditargetkan 67 penyalur beroperasi di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas. Sedangkan pada 2019 ditargetkan 29 penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit.

Permintaan BPH Migas itu disampaikan setelah sebelumnya Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan sejumlah kendala dalam

pelaksanaan program BBM Satu Harga. Dari target 67 penyalur pada 2018, sebanyak empat penyalur telah beroperasi, 9 penyalur sedang proses dibangun di lokasi, serta 54 sisanya sedang proses administrasi dari pemda.

Menurut Nicke, Pertamina telah mengevaluasi lokasi 54 titik itu dan memenuhi kriteria. "Proses perizinan Pertamina sudah keluar, jadi tinggal menunggu pemda," kata Nicke saat konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Sebagaimana diketahui, dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran pendistribusian khususnya BBM di daerah yang belum terdapat penyalur, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No 6/2015 tentang Penyaluran Kenis BBM tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur atau yang lebih dikenal dengan Sub Penyalur.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 13/2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG, dan LPG, maka penyalur wajib menyediakan jenis BBM tertentu atau khusus penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun reformasi, yang salah satunya melalui penerapan satu harga BBM di seluruh tanah air. "Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi," kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroja.

Dukungan pemda

Terkait BBM Satu Harga, BPH Migas dan DPR meminta pemda mempermudah implementasi pembentukan sub penyalur di daerah. Pemda diminta tidak saja mempermudah perizinan, tapi juga tidak menarik pajak dari sub penyalur.

Demikian terungkap dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga secara Nasional di Palembang, Sabtu (19/5) lalu.

Sosialisasi yang dibuka Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa ini dihadiri anggota Komisi VII DPR Nazarudin Kiemas, Komite BPH Migas Ahmad Rizal, Kepala Bappeda Sumsel

Neng Muhaibah, dan Marketing Pertamina Sumbagsel Putut Ardiyatno.

Fanshurullah mengatakan, BBM satu harga tidak akan pernah bisa terwujud jika BBM tidak tersedia dan tidak terdistribusi dengan baik. Salah satu cara agar pendistribusian dan ketersediaan dapat berjalan dengan baik ialah dengan adanya sub penyalur.

Ketiadaan sub penyalur tak saja membuat distribusi dan ketersediaan tidak berjalan baik, tapi juga menyebabkan harga jual BBM di tingkat pengecer tinggi.

Kehadiran sub penyalur menjadi salah satu solusi, kata Fanshurullah, agar harga BBM tidak tinggi, dan terjaminnya ketersediaan harga dan pemerataan distribusi.

Menurut Ahmad Rizal, peran kepala daerah sangat penting karena semua perizinan ada di kepala daerah. "Kami berharap para kepala daerah mempermudah pembentukan sub-penyalur, dan mereka jangan justru dianggap sebagai lahan uang," katanya.

"Kadang-kadang hambatan perizinan justru dari pejabat setempat," imbuh Rizal.

Menurutnya, Pusat sudah bersusah payah berkreasi agar BBM terdistribusi, namun akan menjadi masalah baru jika pejabat setempat tidak mendukung. Padahal kehadiran sub penyalur merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga setempat.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, termasuk dengan kepala daerah agar sub penyalur didukung, dan masyarakat memahami bagaimana menghadirkan sub penyalur di wilayahnya.

Sementara itu, Komisi VII DPR Nazarudin Kiemas meminta sub penyalur tidak dikenakan pajak lagi agar mereka dapat berkembang dengan baik. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan mewujudkan sub penyalur. Apalagi keberadaan sub penyalur sudah lama menjadi bahasan antara DPR dan BPH Migas.

Menanggapi hal itu, Ketua Bappenda Sumsel Neng Muhaibah menegaskan pihaknya memang tidak menarik pajak dari sub penyalur. Pajak ditarik dari pihak dimana sub penyalur mendapatkan pasokan BBM.

★



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kepolisian untuk mengawasi penerapan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4 Tahun 2018 tentang perusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Sinergi ini bukan tanpa alasan karena ditujukan untuk terus memperketat pengawasan usaha hilir migas agar tidak kecolongan menerapkan regulasi.

Diperketat, Pengawasan Penerapan Regulasi

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengatakan, dalam aturan tersebut terdapat poin masa peralihan penetapan wilayah menjadi Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) selama 18 bulan. Selama masa peralihan itu, jika suatu wilayah sudah terdapat Badan Usaha dan juga fasilitasnya, maka sebelum ditetapkan, Badan Usaha dilarang untuk menambah konsumen pelanggannya.

Saat itu, BPH Migas tidak akan lagi menerbitkan izin untuk *dedicated* hilir. Oleh karena itu, BPH Migas menggandeng Kepolisian untuk mengawasi wilayah niaga yang memiliki Badan Usaha beserta fasilitasnya tersebut.

"BPH Migas susun rencana dengan Kepolisian. Jadi, tidak hanya BBM. Tapi juga wilayah niaga gas. Jadi, sejak 25 Januari 2018, dikeluarkan Permen ESDM 4/2018 tidak akan lagi diterbitkan izin *dedicated* hilir," kata Fanshurullah di Kantor BPH Migas beberapa waktu lalu.

Tak hanya pelaku

Selain penambahan konsumen, lanjut Fanshurullah, para pelaku usaha juga akan diawasi dari sisi volume gas maupun penambahan pipa jaringan distribusi di suatu wilayah. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada penambahan konsumen.

"Kita pastikan mereka tidak menambah jaringan distribusi. Setiap bulan, verifikasi. Volume gasnya jadi ketahuan, BPH Migas akan turun juga bersama tim Kepolisian," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah meminta kepastian pasokan gas juga di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dengan terbitnya permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018, BPH Migas ke depan betul-betul melaksanakan tugas di dalam UU Migas No. 12 Tahun 2001 khususnya pasal 46 poin F tentang perusahaan gas transmisi dan distribusi nasional.

"Ini tugas BPH Migas yang melulang ruas transmisi maupun wilayah dan distribusi. Di dalam peraturan BPH yang sudah ada mengacu pada permen tadi kami dikasih waktu 18 bulan. Nanti, ada revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJGBN)-nya," jelas Fanshurullah.

Dia menambahkan, BPH Migas juga akan tetap melaksanakan lelang ruas transmisi. Koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Ditjen Migas tentang bagaimana kepastian juga kelayakan *visible*-nya keekonomian termasuk dengan SKK Migas juga dilakukan.

Sementara itu, Direktur Hilir Dirjen Migas Kementerian ESDM Harya Adityawarman menambahkan, dalam menetapkan WJD dan WNT, Pemerintah juga akan memperhatikan tingkat keekonomian wilayah tersebut.

"WNT dalam aturan peralihan diberikan eksklusif selama 15 tahun. Kita hargai Badan

Usaha harus diakui sampai kontrak habis," tandas Adityawarman.

Menurutnya, aturan itu masih akan disempurnakan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan.

Hak rakyat

Selain dengan Kepolisian, BPH Migas juga memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, setelah ada penambahan kuota. Fanshurullah mengatakan, walau Premium bukan jenis BBM bersubsidi, tetapi pengawasan tetap dilakukan. BPH Migas selaku regulator yang bertugas mengawasi penyaluran BBM telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memantau lembaga penyalur agar tidak terjadi penyelewengan.

"Kami mengawasi dan koordinasi Pertamina yang melakukan penugasan mengawasi penyalurnya ini tidak boleh nakal," kata Fanshurullah.

Dia menuturkan, jika penambahan kuota Premium sudah diterapkan, pengawasan penyalurannya akan semakin diperketat. Dia pun telah meminta pihak Kepolisian untuk membantu mengawasi penyaluran Premium agar tidak terjadi penyimpangan.

"Dan meminta bantuan sama Polri ikut membantu bukan hanya BBM satu harga, tapi kami minta membantu mengawasi. Ini hak rakyat kita, pengawasan harus diperketat," tutur dia.

Penambahan kuota Premium dilatarbelakangi oleh perubahan status Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) menjadi penugasan. Dengan begitu,

Premium menjadi barang wajib yang disalurkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang bermitra dengan Pertamina.

Fanshurullah mengungkapkan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 ditetapkan Premium untuk luar wilayah Jamali sebesar 7,5 juta kilo liter (kl). Jika wilayah Jamali masuk dalam penugasan, kuota Premium ditambah sekitar 5,1 juta kl. Volume tersebut akan ditambah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah kendaraan, dan migarasi dari Peralite ke Premium.

"Minimal 7,5 juta kl plus 5,1 juta kl begitu. Belum kami melihat akibat penambahan kendaraan, pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi dampak Peralite naik Rp200 ini berdampak bergeser kembali awal Peralite ke Premium," ujar dia. ★





Kawal BBM Satu Harga, Stop Penyimpangan

BPH Migas mendapati tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Solar dan Premium di sejumlah wilayah. Hal ini berarti ada indikasi penyimpangan yang dilakukan dalam program BBM Satu Harga.

Salah satu wilayah yang diduga terdapat indikasi penyimpangan BBM Satu Harga adalah Sumenep, Madura, Jawa Timur. Indikasi penyimpangan juga ditemui di wilayah-wilayah lain dengan beragam modus.SPBU.

Mencari solusi

Terkait hal ini, Komite BPH Migas Henry Ahmad mengatakan, dalam hasil pengawasan BBM Satu Harga di Kabupaten Sumenep, ditemukan distribusi yang lancar. Tapi, ternyata fasilitas penyaluran belum dibangun.

"Di Kepulauan Sambudi, yaitu di Kota Nunggunung dan Kepulauan Raas, ternyata BBM ini sebagian dijual ke pengepul dalam bentuk drum. Dari pengepul dijual ke pengecer. Akhirnya, masyarakat

mendapatkan Premium Rp9.000-Rp10.000 per liter, Solar Rp7.000-Rp7.500 per liter," jelas Henry Ahmad di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

BPH Migas juga menemukan penyimpangan penyaluran BBM Satu Harga di Pulau Sangiang, Banten. Hendry mengatakan, Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) yang sudah dioperasikan menjual bensin dengan drum ke pengepul bukan langsung ke masyarakat.

"Kami menindaklanjuti ini dengan Pertamina dan Pemda. Kesepakatan Jumat besok untuk mencari solusi. Sementara APMS dinonaktifkan. Kami akan mengatur pemerintah daerah (pemda) bagaimana mendistribusikan bensin di wilayah itu supaya tidak mengganggu kepentingan masyarakat," ujarnya.

Minta masyarakat melapor

Dengan masih ditemuinya indikasi penyimpangan BBM, BPH Migas meminta masyarakat dan pemda untuk melapor ke pihaknya jika lembaga penyalur BBM Satu Harga melakukan penyimpangan.

Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia mengatakan, tindakan tersebut merupakan langkah yang paling cepat agar BPH Migas bisa segera menangani penyimpangan yang terjadi di lapangan.

"Walaupun tugas kita mengawasi tapi kan tidak mungkin seluruh Indonesia dalam satu waktu. Jadi paling cepat ya lapor ke kita. Kita bisa menegur," kata Lobo di Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Rabu (18/4/2018).

Lobo mengungkapkan, sejauh ini penyimpangan kerap ditemui mereka di lapangan. Yang terbaru, kata Lobo, saat Anggota Komite BPH Migas Hendry Achmad menemukan penyimpangan di Kangeang, Madura, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Lobo menuturkan, Hendry menemukan ada SPBU BBM Satu Harga yang malah menjual BBM di rumah pemilik SPBU. Padahal, pengusaha tersebut sudah diberi fasilitas oleh Pertamina untuk bisa membangun SPBU tersebut.

"Kalau di SPBU BBM Satu Harga ini banyak kejadian yang aneh-aneh, yang di Kangean itu ketahuan, benar ada. Masa dia buka SPBU cuma pagi terus sisanya dijual di rumahnya?" paparnya.

SPBU BBM Satu Harga di Kangean yang bermasalah baru-baru ini ada dua. Keduanya didirikan pada tahun 2017 lalu. Lobo menuturkan, setiap SPBU ada aturannya. Salahnya satunya volume BBM yang harus disalurkan ke masyarakat. Pasokan BBM yang diperoleh SPBU dari Pertamina harus dijual langsung ke masyarakat semuanya, tidak boleh dijual ke pengecer atau industri.

Dengan dibukanya lembaga penyalur BBM Satu Harga di Banggai Laut, Lobo mengatakan SPBU ini harus dijaga dengan baik.

"Ini harus dijaga ya Pak. Semoga upaya kita menjadi berkat bagi warga Banggai Laut. Kadang Pertamina nakal juga, tidak ditata. Kalau ada apa-apa lapor saja ke kami, Pak Bupati," katanya.

Tindak tegas

BPH Migas meminta Pertamina agar melakukan penindakan terhadap APMS yang melakukan penyimpangan pada program BBM Satu Harga. Menurut Henry Ahmad, nantinya bagi para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bakal ditindak dengan tegas melalui sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

"Kita tegas kepada Pertamina. Jika ada penyimpangan, penyalurannya ditutup dan dicari solusi supaya wilayah tersebut BBM tetap bisa disalurkan," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Hendry menambahkan, saat ini pihaknya terus memonitor wilayah pada program

satu harga BBM. Selain itu, BPH menggelar Operasi Patuh Penyalur (OPP) di setiap wilayah.

"Kita memantau kegiatan distribusi ke SPBU *existing*. Waktu awasi juga kita libatkan polisi setempat, ada dukungan itu, supaya tidak ada main penyelewengan," tambahnya.

BPH Migas juga mengatakan sulitnya pasokan distribusi BBM jenis Premium di beberapa wilayah Indonesia jadi masih kendala. Pihaknya menilai adanya dua dugaan penyebab berkurangnya penyediaan BBM di wilayah Lampung, misalnya, beberapa hari belakangan.

"Indikasi di lapangan, ada dua mereka kurangi pasokan supaya cukup," kata Henry Ahmad.

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo optimis program BBM Satu Harga yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera terealisasi di berbagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia memahami, BPH Migas pasti tidak mudah mengerjakan program BBM Satu Harga.

"DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat," ujarnya saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin M. Fanshurullah Asa di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3/2018). ★



Antara Metode Penunjukan Langsung atau Lelang



Selama ini, proses distribusi gas yang dilakukan di sejumlah daerah adalah dengan penunjukan langsung. Akibatnya, *toll fee* atau biaya angkut gas tidak terkontrol. Oleh sebab itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong mekanisme lelang dalam pemilihan operator yang akan melakukan distribusi dan transmisi gas.

EFISIENSI

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan hal tersebut belum lama ini. Ia berujar, "Kalau penunjukan langsung ini hubungannya *business to business* atau perjanjian hanya terjadi antar Badan Usaha ke Badan Usaha lain sehingga tidak terkontrol *toll fee* berapa".

Langkah lelang dinilai dapat mewujudkan efisiensi sehingga mampu menekan harga gas menjadi lebih murah. Dengan adanya proses lelang, maka pemenang lelang akan diberikan hak wilayah selama kurang lebih 30 tahun. Dampaknya tidak akan ada tumpang tindih keberadaan pipa distribusi di suatu wilayah. Selain itu, akan terwujud juga efisiensi harga gas.

Selain itu, Fanshurullah mengatakan, aturan dasar lelang sudah ada awal tahun ini. Menteri ESDM Ignasius Jonan sudah menerbitkan Pelaturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dengan adanya aturan ini, maka Badan Usaha (BU) yang ingin menjalankan bisnis distribusi dan transmisi gas tinggal mengajukan ke BPH Migas.

"Badan Usaha tidak perlu lagi melalui tahapan kajian konsultan dan BUMN," kata Fanshurullah.

TIGA PROYEK

BPH Migas sendiri berencana melelang tiga proyek ruas pipa gas pada tahun ini. Ketiga proyek pipa gas yang akan dilelang tersebut antara lain proyek pipa gas ruas Natuna (Kepulauan Riau) ke Kalimantan Barat sepanjang 487 km, ruas Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah sepanjang 1.018 km, dan ruas Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan sepanjang 192 km.

"Kami akan mencoba melelang tiga proyek itu yang sudah ada di Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional," ujar Fanshurullah di kesempatan berbeda.

Adapun rencana induk yang berlaku saat ini mengacu pada Kepmen ESDM No. 2700 K/11/MEM tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025.

Fanshurullah menuturkan, ruas-ruas pipa tersebut nantinya akan saling terintegrasi dan akan terhubung dengan ruas pipa Kalija (Kalimantan-Jawa).

"Yang dari Bontang nanti masuk ke Kalimantan termasuk ke Jawa Tengah," katanya.

"Semua terintegrasi. Semua bisa masuk ke Natuna. Natuna masuk ke Batam, Batam bisa masuk ke wilayah Sumatera. Ini satu lingkaran," jelasnya.



Dia berujar upaya melelang ketiga proyek pipa gas tersebut juga bertujuan untuk memperbesar investasi di sektor ESDM, baik di hulu maupun di hilir. Berdasarkan penuturannya, total nilai investasi ketiga proyek tersebut mencapai USD1,25 miliar.

Bila dirincikan, nilai investasi pada proyek pipa gas ruas Natuna-Kalimantan Barat mencapai USD595 juta, ruas Kalimantan Barat-Kalimantan Tengah mencapai sekitar USD516 juta, dan ruas Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan sekitar USD97 juta.

Terkait pembangunan proyek tersebut, Fanshurullah telah melihat adanya potensi kebutuhan gas di antaranya, yakni dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Kalimantan Barat berkapasitas 100 megawatt (MW), PLTU Kalimantan Selatan berkapasitas 200 MW, dan lainnya.

"Kalau pipa ini dibangun bisa untuk pipa distribusi, termasuk untuk jaringan gas untuk kawasan rumah tangga di kawasan Kalimantan," lanjutnya.

Distribusi medio

Tambah pula, BPH Migas akan melakukan lelang untuk wilayah jaringan distribusi

gas bumi paling lama pertengahan 2019. Harapannya, aksi lelang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu membuat industri gas hilir Indonesia lebih efisien. Terkait hal ini, Fanshurullah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait seperti Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Kami ke depan akan memperkuat tugas terkait transmisi dan distribusi gas bumi," ujarnya.

BPH Migas nantinya melakukan lelang untuk wilayah jaringan distribusi (WJD). Dalam Permen No. 4 Tahun 2018 disebutkan, Menteri ESDM akan menetapkan WJD untuk dimasukkan dalam rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas nasional dalam jangka waktu paling lama 18 bulan.

Dengan begitu, lelang pertama untuk WJD akan bisa dilakukan mulai 2019. Lalu, selama proses pembentukan lelang WJD, BPH Migas tidak akan menerbitkan *dedicated* hilir atau pipa gas bumi yang dibangun dan dimanfaatkan Badan Usaha untuk mengangkut gas bumi milik sendiri.

Ivan, sapaan Fanshurullah, mengatakan pihaknya ingin fokus menata industri hilir gas yang dulu hanya menggunakan izin *dedicated* hilir tersebut.

"Soalnya, saat ini industri hilir migas tidak efisien sehingga berdampak pada harga jual akhir kepada konsumen. Kami berupaya membuat industri ini lebih efisien sehingga harga kepada masyarakat bisa lebih murah," paparnya.

Fanshurullah mengatakan, ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar gas bisa mengalir, yaitu infrastruktur, *demand* (permintaan gas), dan *supply* (pasokan gas).

"Ada tiga masalahnya, yakni infrastruktur, *supply side*, dan *demand side*. Ini yang perlu terintegrasi. Yang punya alokasi gas itu bukan BPH Migas, tetapi melalui Pemerintah (Menteri ESDM) melalui Permen ESDM 6/2015," kata Fanshurullah. ★

Banyak Peminat, Jargas Terbukti Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga atau dikenal dengan sebutan jargas merupakan program berkelanjutan Pemerintah yang bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mempercepat terlaksananya diversifikasi energi, mewujudkan energi berkeadilan serta pemerataan pembangunan. Persyaratan pembangunan jargas antara lain wilayah tersebut dekat dengan sumber gas atau pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi (tidak membahayakan masyarakat), terdapat potensi pasar pengguna, komitmen Pemerintah Daerah serta memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.

MINTA TAMBAH

Digulirkan sejak tahun 2009, jargas diminati oleh banyak masyarakat karena terbukti meningkatkan perekonomian rakyat. Minat besar jargas, misalnya, tercermin saat Pemerintah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto meminta tambahan pemasangan jargas bagi masyarakatnya. Dengan adanya jargas, masyarakat dapat berhemat sedikitnya Rp50 ribu per bulan. Jumlah yang cukup lumayan bagi warga menengah ke bawah.

"Jargas merupakan sumbangan yang tidak sedikit nilainya (bagi masyarakat). Berdasarkan pengalaman masyarakat Kecamatan Wates (yang sudah lebih dulu menggunakan jargas), masyarakat hemat Rp55 ribu per bulan. Kalau dikalikan 5.000 (rumah tangga), tiap bulan membantu masyarakat Kota Mojokerto Rp275 juta. Kalau setahun Rp3,35 miliar," kata Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus pada acara peresmian pengoperasian 10.101 sambungan rumah (SR) jargas di Kota dan Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/2).

Menurut dia, jargas sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain lebih murah, jargas juga memudahkan para ibu karena dapat memasak kapan saja diperlukan. Selain itu lebih aman.

"Tahun 2019, kami mengajukan 22.000 sambungan. Kalau dikabulkan, Pak Menteri jadi orang pertama yang masuk surga (karena banyak menolong orang)," ujar Mas'ud sambil tersenyum.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjanjikan akan

memberikan masing-masing 10.000 SR untuk Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto apabila pada tahun 2019 dana pembangunan jargas melalui APBN disetujui 100.000 SR.

"Tahun 2019 semoga kita bisa mendapatkan alokasi lebih banyak. Kalau dapat 100.000 SR, saya janji deh Kota Mojokerto dapat 10.000 SR dan Kabupaten Mojokerto juga 10.000 SR," kata Jonan.

Setali tiga uang, masyarakat Kota Tarakan juga sedang bergembira. Pasalnya, di tahun 2018 ini, Pemerintah kembali akan membangun 5.859 SR di kota tersebut. Dengan demikian, hingga akhir tahun diperkirakan sebanyak 30.225 rumah tangga tersambung jargas atau 75% dari seluruh rumah tangga di Kota Tarakan.

Ini merupakan kali ketiga masyarakat Kota Tarakan mendapat fasilitas jargas dari Pemerintah. Sebelumnya pada tahun 2010, kota ini menjadi salah satu percontohan jargas dan mendapat 3.366 SR untuk masyarakat di lima kelurahan. Selanjutnya tahun 2016, Kota Tarakan kebagian 21.000 SR yang digunakan untuk mengaliri 11 kelurahan.

Ditambah dengan tahun ini sebanyak 5.859 SR untuk empat kelurahan, yaitu Kelurahan Mamburungan, Kampung Empat, Kampung Enam, dan Mamburungan Timur. Maka, di akhir tahun akan tersambung 30.225 SR di kota tersebut.

Kenyataan ini sangat disyukuri masyarakat juga para pemimpin Kota Tarakan. Betapa tidak? Sebelum tahun 2010, merupakan hal biasa jika terdapat antrean panjang para ibu

yang ingin mendapatkan LPG 3 kg. Dengan adanya jargas, antrean ini tidak ada lagi.

Mewakili masyarakat Kota Tarakan, Plt Walikota Tarakan Khaeruddin Arif Hidayat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM yang telah membangun jargas. Dengan adanya jargas, maka jatah LPG 3 kg yang diperoleh daerah tersebut dapat disalurkan ke masyarakat yang belum mendapat fasilitas ini, juga nelayan dan UMKM.

78.315 SR

Percepatan pembangunan jargas juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo demi mewujudkan pemerataan pembangunan. Jargas sendiri telah dibangun sejak tahun 2009 dengan menggunakan dana APBN. Hingga tahun 2017, jumlah SR yang dibangun mencapai 235.925 SR di 15 provinsi yang tersebar di 31 kabupaten/kota.

Untuk tahun 2018, Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas), akan membangun jargas sebanyak 78.367 SR di 16 wilayah. PT Pertamina (Persero) dan PT PGN ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan jargas tersebut yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 267 K/10/MEM/2018 dan Kepmen ESDM Nomor 268 K/10/MEM/2018 tertanggal 25 Januari 2018.

Terkait hal tersebut, Jumat (23/3), bertempat di Auditorium Migas, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Ego Syahrial menandatangani Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas dengan 16 Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Penyediaan dan Pendistribusian



Gas Bumi Melalui Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

Bupati/walikota yang hadir dalam acara ini antara lain Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Pasuruan Setiyono, Walikota Probolinggo Rukmini, dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. Selain itu, hadir pula Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Tunggal, wakil Pertamina dan PGN serta instansi terkait lainnya.

Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas. Pada tahun ini, Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp886 miliar untuk pembangunan jargas.

“Untuk tahun ini, anggaran Ditjen Migas Rp1,7 triliun. Hanya Rp280 miliar yang digunakan untuk belanja rutin. Sisanya Rp1,42 triliun digunakan untuk pembangunan. Salah satunya jargas. Kami alokasikan (jargas) hampir Rp900 miliar,” papar Ego.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo

agar dari seluruh anggaran APBN, minimal separuhnya harus dapat dinikmati oleh masyarakat.

Rencananya, jargas pada tahun ini dibangun di Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kota Medan (5.000 SR), Kabupaten Deli Serdang (5.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.167 SR), Kota Prabumulih (6.000 SR), Kota Palembang (4.315 SR), Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.210 SR), Kota Cirebon (3.503 SR), Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR), Kota Pasuruan (6.314 SR), Kota Probolinggo (5.025 SR), Kota Bontang (5.000 SR), Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.002 SR), dan Kota Tarakan (5.859 SR).

DUKUNGAN

Secara teori, tekanan gas melalui jargas yang dialirkan ke rumah sangat rendah. Bahkan, lebih rendah daripada tekanan tabung elpiji yang saat ini digunakan. Selain tekanan yang rendah, pemasangan pipa jargas juga dilengkapi dengan *valve/kran* yang dapat ditutup jika terjadi kebocoran sehingga kebocoran tidak terus terjadi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Dengan kata lain, pembangunan jargas adalah sebuah bentuk terobosan menuju *smart city* melalui perwujudan *smart energy* dan *smart economy*.

Kegiatan pembangunan jargas juga merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015–2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.

Meski begitu, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga, seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu, Kementerian ESDM meminta dukungan para bupati dan walikota agar pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas berjalan lancar sehingga kemandirian dan kedaulatan di bidang energi dapat tercapai. Masyarakat juga akan merasakan energi yang berkeadilan dengan terpenuhinya kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan, dan efisien. ★

Skema KPBU, Solusi Percepatan Pembangunan Jargas

Selama ini, pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) mengandalkan dana APBN. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat APBN terpatok dalam batas nilai tertentu. Alhasil, pembangunan jargas belum optimal.



MINIM

Pemerintah menganggarkan dana Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur jargas nasional. Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, dana tersebut dinilai masih minim jika digunakan untuk membangun 70 ribu sambungan jargas. Padahal penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa dengan 100 juta rumah tangga. Herman mengungkapkan membangun jargas bukan hanya menyambungkan koneksi ke rumah tangga, tapi bagaimana harus membangun infrastruktur di transmisi dan hulu.

"Dana itu sangat terbatas untuk pembangunan 70 ribu sambungan jargas saja," katanya belum lama ini.

Terlebih, saat ini pembangunan jargas masih tergantung kepada beberapa wilayah yang menghasilkan sumber gas bumi.

Pembangunan jargas ini dinilai penting terutama bagi wilayah yang tidak memiliki sumber gas bumi. Salah satunya Kota Bandung yang belum terkoneksi dengan Jargas karena tidak memiliki sumber gas bum. Tapi, hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun infrastruktur pipa gas bumi.

"APBN harus memberikan ruang yang cukup untuk membangun pipa transmisi gas maupun BBM. Ini prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat," jelasnya.

Herman menyebutkan, dengan keterbatasan dana APBN, maka proporsinya akan dibagi, misalnya dengan proyek pembangunan jembatan maupun digunakan untuk infrastruktur migas.

"Pembangunan ini kita masih tertinggal sehingga harus direalisasikan melalui APBN. Diharapkan ke depannya tidak membebani

harga yang berlaku di masyarakat," ungkapnya.

Dia menilai dengan jika dibandingkan dengan subsidi BBM, maka pembangunan jargas bisa menghemat biaya sekitar 50%. Misalnya, selama ini masyarakat menggunakan tabung gas yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp18.000. Sedangkan dengan jargas masyarakat bisa membeli dengan harga Rp1.750/m3.

Herman mengimbau kepada Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur migas karena BBM dan gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

"Kan secara kebutuhan BBM dan gas hampir dikonsumsi setiap hari. Kalau infrastrukturnya tidak terbangun secara langsung, ini akan menambah beban transportasi yang sifatnya konvensional," jelasnya.

Selain itu akan membebani terhadap ketersediaan ruas jalan dan biaya transportasi. Untuk itu, dibutuhkan jaringan pipa secara langsung.

Ke depan diharapkan ada keseimbangan pembangunan infrastruktur yang antara lain dengan membangun jaringan pipa BBM maupun gas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jika belum ada payung hukumnya, maka DPR RI akan menyiapkannya.

BERKALA

Terkait hal ini, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mendorong agar pembangunan jargas menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

“Kalau konsepnya menggunakan APBN itu akan lama sekali tercapai. Kita harapkan dengan skema KPBU maka ini bisa cepat prosesnya,” ujar pria yang akrab disapa lfan ini di Bali, Kamis (30/8/2018).

KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Fanshurullah, dalam RPJMN Tahun 2015–2019 ditargetkan 1,2 juta rumah tersambung jargas. Namun, hingga saat ini realisasinya masih jauh dari target.

“Ternyata dari 1,2 juta sambungan rumah dalam RPJMN 2015-2019, baru yang terealisasi di bawah 300.000. Itu padahal ada dalam RPJMN 2015-2029, itu amanah nawacita,” kata Fanshurullah.

Menurutnya, jargas cukup strategis guna menekan impor elpiji di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah.

“Ini kan bisa mengurangi impor elpiji yang mungkin capai 60% total yang dikeluarkan, ini kan mengurangi juga penggunaan BBM,” ucap dia.

TANTANGAN

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal membeberkan sejumlah

tantangan yang dihadapi dalam industri gas bumi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ahmad saat memberi sambutan dalam *workshop* bertema “Kesiapan Infrastruktur Hilir Gas Bumi Indonesia Menghadapi Tantangan Global” di Bali, Kamis (30/8/2018).

Dalam kegiatan ini membahas arah kebijakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur hilir gas bumi, optimalisasi pemanfaatan gas bumi khususnya untuk kebutuhan dalam negeri dan juga melihat peluang, tantangan, dan kendala dalam pemanfaatan gas bumi.

“Tantangan besar dalam bisnis gas saat ini adalah permintaan gas dalam negeri yang terus meningkat,” ujar Ahmad.

Selain itu, kondisi geologis Indonesia juga menjadi kendala dalam mengembangkan bisnis gas bumi.

“Dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, ini juga cukup menyulitkan dan

membutuhkan investasi infrastruktur gas yang cukup besar,” kata Ahmad.

Ahmad melanjutkan, Pemerintah selaku regulator juga harus membuat regulasi yang jelas agar pembangunan infrastruktur gas bumi bisa terus berkembang.

“Bahwa dalam pengembangan infrastruktur membutuhkan data informasi arah, regulasi, kebijakan yang harus jelas. Demikian pula, ketersediaan alokasi gas bumi seyogyanya dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur gas bumi,” ucap dia.

Terkait dengan ini, Fanshurullah meminta alokasi gas lebih banyak digunakan untuk industri dalam negeri ketimbang di ekspor.

“Memastikan dari sisi alokasi gas kita ingin gas lebih diutamakan untuk dalam negeri. Sehingga kita bisa mengurangi penggunaan solar yang lebih mahal, impor dan lainnya. Sementara kan gas ada di dalam negeri,” lanjutnya. ★





BPH Migas Konsisten Monitoring dan Sosialisasi Penyaluran BBM

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim melaksanakan monitoring penyaluran BBM ke dua titik lokasi sub penyalur BBM di pedalaman Kalimantan Barat, Senin (23/7/2018). Kedua titik tersebut adalah Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya dan Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Perjalanan yang menempuh tiga jam menggunakan speed boat tak menyurutkan komitmen BPH Migas dalam memantau penyaluran BBM agar tepat sasaran.

Monitoring penyaluran BBM ini merupakan tindak lanjut Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas.

RATUSAN

Dari kunjungan tersebut, terungkap bahwa Bupati Kubu Raya berencana akan membangun lagi tambahan 10 lembaga sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Kubu Raya.

Di Kalimantan Barat sendiri baru ada dua sub penyalur, yakni di Desa Padang Tikar

dan Batu Ampar. Fanshurullah berharap dua sub penyalur itu menjadi percontohan bagi masyarakat maupun BUMDes dalam penerapannya.

"Di sini ada 14 kabupaten/kota. SPBU Pertamina wajib menyalurkan ke sub penyalur," kata Fanshurullah.

Tak hanya Kabupaten Kubu Raya, BPH Migas sendiri menerima 253 permohonan pembentukan sub penyalur BBM subsidi dari beberapa pemda. Fanshurullah menargetkan, seluruh permohonan tersebut bisa terealisasi hingga akhir tahun ini.

"Kita mau sebanyak-banyaknya (sub penyalur). Kalau target saya 253 ini harus selesai tahun ini," ujar Fanshurullah saat ditemui usai sosialisasi sub penyalur BBM satu harga di Pontianak, Selasa (4/9/2018).



Fanshurullah memastikan pembangunan sub penyalur tak akan lama. Hingga saat ini, baru ada 16 sub penyalur di 16 provinsi. Ke depannya, ia berharap semakin banyak kelompok masyarakat maupun Badan Usaha Milik Desa yang mau berpartisipasi menjadi sub penyalur.

"Maunya kita minimal satu desa satu sub penyalur. Jadi kalau ada 75.000 desa, ya semua ada," kata Fanshurullah.

Ia menambahkan, rencananya pekan depan BPH Migas akan memanggil pemda-pemda yang mengajukan permohonan sub penyalur. Kemudian, mereka bersama-sama akan meninjau lokasi yang akan dibuka sub penyalur untuk melihat kelayakannya. Peninjauan itu juga akan melibatkan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur BBM subsidi.

"Kalau lokasi sudah oke, nanti dibangun. Nanti bupati menetapkan," katanya.

BERTANGGUNG JAWAB

Selain monitoring, BPH Migas juga konsisten melakukan sosialisasi terkait dengan implementasi sub penyalur di berbagai daerah. Belum lama ini, misalnya, sosialisasi tersebut diadakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM satu harga secara nasional tersebut di gelar di Hotel Mahavira, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komite BPH Migas Marwansah Lobo Balia menyampaikan, BPH Migas sebagai lembaga yang ditunjuk Pemerintah dalam melakukan monitoring dan pengawasan

terhadap kegiatan hilir minyak dan gas bumi dan bertanggung jawab terhadap distribusi BBM secara nasional.

Dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan distribusi secara merata dan akses BBM yang mampu menyentuh masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau, khususnya di daerah pedalaman Papua, BPH Migas berupaya mendukung percepatan sub penyalur di daerah-daerah yang tidak terjangkau SPBU Pertamina.

"Kita tugasnya mengatur dan menetapkan ketersediaan distribusi BBM. Penting sekali BPH Migas untuk menjamin distribusi BBM secara nasional," katanya di Hotel Mahavira, Nabire, Papua, Sabtu (1/9/2018).

Lobo menjelaskan bahwa dari 7.000-an Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU) yang eksisting di seluruh wilayah Indonesia saat ini, masih jauh dari optimal. Sementara untuk membangun SPBU baru membutuhkan investasi yang cukup besar. Di sisi lain, membangun SPBU harus melihat sisi keekonomiannya sebab membangun SPBU di daerah terpencil dianggap tidak ekonomis bagi badan usaha.

“Untuk wilayah yang tidak ter-cover SPBU itu, kita isi dengan sub penyalur. Bagaimana kita membuat penyalur-penyalar tambahan yang legal sehingga kita dapat membuat semuanya berkah dan distribusi BBM yang merata di seluruh Indonesia,” tambah dia.

Dengan program sub penyalur tersebut, menurut Lobo Balia, distribusi bisa ditekan jauh lebih efisien. Yang paling penting, mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah yang sulit terjangkau oleh SPBU yang ada.

“Biaya distribusinya bisa ditekan. Itu filosofi yang kita anut dari program sub penyalur ini, di mana biaya distribusinya rendah, namun tidak membebani masyarakat. Sebab, dalam UU Migas, Pemerintah wajib menjaga ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI,” katanya.

DAMPAK POSITIF

Sementara itu, Komisi VII DPR RI menjadi mitra Kementerian ESDM dan BPH Migas mendukung upaya Pemerintah melalui peran BPH Migas dalam mengimplementasikan energi berkeadilan di berbagai wilayah di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Yudi Kotouky mengatakan, industri migas memiliki peran penting dalam mendukung energi nasional. Karena itu, menurut dia harus dikelola secara profesional dan transparan. Sehingga mampu memberikan ketersediaan BBM kepada masyarakat Indonesia secara berkeadilan.

Yudi berharap ke depan dengan adanya sub penyalur yang sedang dibangun ini, nantinya mampu memberikan dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan BBM, khususnya bagi masyarakat Papua. Sebab selain mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat juga menjamin ketersediaan energi.

“Migas punya peran penting dalam mendukung energi nasional, karenanya harus di kelola secara efektif, efisien dan transparan. Karena ini terkait dengan Nawacita Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Ke depan dengan adanya sub penyalur ini semoga mampu menjamin ketersediaan BBM di Indonesia, khususnya Papua,” kata Yudi di tempat yang sama.

Anggota Komisi VII DPR RI lainnya Dardiansyah juga mengapresiasi upaya BPH Migas yang gencar melakukan sosialisasi sub penyalur, guna merealisasikan program satu harga BBM dan gas ke berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya, BPH Migas sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam

penyaluran BBM dan gas subsidi agar terdistribusi tepat sasaran, menggelar Sosialisasi Implementasi Sub Penyaluran di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (24/8/2018).

Dardiansyah mengungkapkan, terdapat sejumlah permasalahan yang kerap ditemukan pihaknya di Kalimantan Selatan. Salah satunya yakni terkait kelangkaan BBM dan gas, terlebih di momen menjelang hari raya keagamaan dan hari besar nasional.

“Permasalahan yang kami hadapi di sini tiap tahun kalau sudah menjelang hari-hari besar, bulan puasa, tahun baru, itu selalu terjadi kelangkaan (BBM dan gas). Sampai-sampai harga gas 3 kilogram itu bisa mencapai harga Rp40 ribu. Ini luar biasa,” katanya.

la melanjutkan, sebenarnya Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Tapi ironinya, nyaris selalu kekurangan. Dan hal itu tentunya menjadi pekerjaan rumah yang memang perlu mendapat perhatian khusus.

la pun berharap, sosialisasi sub penyalur yang digelar BPH migas dapat menjawab permasalahan yang ada, utamanya terkait kelangkaan BBM dan gas, umumnya di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan sendiri. ★



Konsisten Awasi Penyaluran

BBM

Komite BPH Migas konsisten turun ke lapangan untuk mengawasi langsung penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah di tanah air. Salah satunya terlihat saat Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar bersama Anggota Komisi 7 DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung Eko Wijaya melakukan monitoring dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (13/5/2018). Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan BBM, khususnya Premium dan Solar bersubsidi di wilayah tersebut.



Pengawasan dilakukan di SPBU 23.331.11 Pangkal Balam, SPBU 24.33170 Muntok, dan SPBU 24.33167 Pangkalpinang. Dalam kunjungan tersebut, Ibnu menjelaskan, stok BBM, khususnya Premium penugasan dan Solar bersubsidi masih sesuai dengan kuota tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Ibnu juga meminta kepada Pertamina melalui SER Pertamina yang turut dalam pengawasan ini untuk mengelola pendistribusian BBM ke SPBU secara proporsional sehingga tidak terjadi antrean di SPBU.

Di sela-sela kunjungan ke tiga lokasi tersebut, rombongan juga menemui SPDN 29.33215 Pantai Rebo Sungailiat masih tutup. Tutupnya SPDN itu karena disinyalir adanya dugaan penyalahgunaan Solar bersubsidi yang dibeli di tempat tersebut. Setelah pembinaan oleh Pertamina, SPDN tersebut diharapkan untuk segera dibuka

kembali guna memenuhi kebutuhan nelayan sekitar.

Di tempat dan tanggal terpisah, Komite BPH Migas M. Lobo Balia bersama Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melaksanakan monitoring dan pendistribusian BBM di Terminal Transit BBM Wayame, Maluku, Kamis (21/6/2018). Terminal Transit BBM Wayame merupakan pintu masuk gerbang distribusi BBM di Indonesia Bagian Timur yang menyuplai 21 TBBM di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dari Terminal Transit BBM Wayame, Lobo menyampaikan, BBM yang sebagian berasal dari ex Kilang Balikpapan dan Cilacap ini dilaporkan suplai dan distribusinya aman. Untuk menunjang ketahanan stok di wilayah Timur Indonesia, Terminal Transit Wayame merencanakan akan membangun

tangki Premium kapasitas 20.000 KL dan tangki Solar kapasitas 10.000 KL serta dua tangki LPG dengan kapasitas masing-masing 1.000 MT. Selama ini, suplai LPG masih dari Surabaya, Jawa Timur.

Tak berhenti di situ, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar dan Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM pasca Idul Fitri 2018 di ASDP Merak, Kamis (21/6/2018).

Rangkaian kegiatan monitoring dimulai dengan melaksanakan rapat bersama. Selanjutnya, rombongan melakukan pengecekan lapangan sarana flometer BBM di ASDP Merak. Lokasi kedua monitoring adalah Depo Stasiun Rangkasbitung, Lebak, Banten. Komite BPH Migas bersama tim langsung melakukan peninjauan lapangan tangki BBM Depo Stasiun KAI Rangkasbitung, Lebak. ★

Pertukaran Data Konsumsi BBM, BPH Migas Gandeng Pemprov Sumsel

Pada Kamis (7/6/2018), dilakukan penandatanganan kerjasama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pertukaran data konsumsi BBM. Hal ini terkait adanya dugaan beberapa Badan Usaha (BU) tidak memberikan laporan akurat terkait volume transaksi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu berpotensi merugikan daerah sebagai penerima setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) maupun Pemerintah Pusat.

"Ini pertama kali kami kerjasama dengan daerah dan nanti pasti akan menyusul dengan tempat lainnya," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di sela-sela penandatanganan tersebut.

Dalam kerjasama tersebut, kata Fanshurullah, Sumatera Selatan akan mendapatkan data riil transaksi dari perusahaan yang bergerak di daerah. Dari data tersebut, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pengejaran kepada BU yang dimaksud untuk menagih PBBKB sesuai data. Adapun BPH Migas juga dapat menagih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saat ini, kata Fanshurullah, pihaknya baru mendapatkan Rp1,2 triliun dari PNPBBH. Dengan adanya kerjasama tersebut, ia optimistis setoran dari Badan Usaha bisa menembus angka Rp2 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PBH tersebut bersumber dari 120 BU yang menjual BBM non subsidi. ★



Peninjauan Sistem Pengaliran Gas Bumi Melalui Pipa Milik Energas

Komite BPH Migas Jugi Prajogio dan M. Lobo Balia beserta Tim Direktorat Gas Bumi melakukan peninjauan sistem pengaliran gas bumi melalui pipa milik PT Energasindo Heksa Karya ruas Tempino Kecil-Payo Selincah-Sei Gelam di wilayah Jambi, Kamis (28/6/2018). Kegiatan ini sebagai tahapan kerja BPH Migas dalam melaksanakan tugas fungsi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang adil dan wajar.



Pipa transmisi gas dari Tempino Kecil-Payo Selincah mengalirkan gas dari ConocoPhillips ke PT PLN (Persero) Power Jambi. PT Energasindo Heksa Karya sendiri adalah perusahaan swasta niaga Indonesia pertama dalam bidang distribusi gas bumi. Sejak mulai beroperasi secara komersial di tahun 1999, PT Energasindo Heksa Karya, yang akrab disebut dengan nama Energas, sampai saat ini telah mempunyai jaringan distribusi pipa gas sepanjang lebih dari 90 km dengan rata-rata penjualan sebesar 65,5 MMSCFD dari total 25 perusahaan pelanggan yang sebagian besar adalah perusahaan dalam bidang industri dan pembangkit tenaga. ★

BPH Migas Kirimkan Satu Wakil pada *Young Professional Program*

M. Arief Rokhman Hakim, dari BPH Migas, terpilih sebagai satu-satunya perwakilan Kementerian ESDM dalam kegiatan *Young Professional Program* (YPP). YPP merupakan salah satu kegiatan *World Gas Conference 2018* yang diadakan di Washington DC, Amerika Serikat tanggal 27-29 Juni 2018.

Terpilihnya Arief setelah melalui seleksi dan wawancara serta undangan dari Kedutaan AS untuk Indonesia. YPP bertujuan untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan mendukung *future leaders* dengan mempertemukan para kandidat di industri migas dan memberikan mereka paket pengetahuan dan *networking opportunity*.

Khusus bagi para *young leader* yang diundang, diberikan kesempatan *networking* dengan Sarah McKinley, *Manager of Outreach Office of External Affairs* dari Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Dilanjutkan, *networking* melalui *meeting* bersama pejabat *U.S. Department of State*, yaitu Francis R. Fannon selaku *Assistant*

Secretary of U.S. Bureau of Energy Resources dan Benjamin Nussdorf selaku *Senior Policy Advisor* serta pejabat *Chief of Asia Team* dari *Bureau of Energy Resources*.

Tidak hanya itu, mereka juga dipertemukan dalam *reception in honor* secara terbatas dengan Michael R. Pompeo selaku *U.S. Secretary of State* dan Rick Perry selaku *U.S. Secretary of Energy* serta para CEO perusahaan-perusahaan industri migas AS yang diundang. ★



Rapat Pembahasan Pendahuluan KEM dan PPKF 2019



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan menghadiri Rapat Pembahasan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2019 di Ruang Rapat Banggar Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Selasa (3/7/2018). Rapat ini di antaranya membahas kebijakan penerimaan migas dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Penerimaan negara dari sektor hulu migas hingga semester I-2018 mencapai USD8,5 miliar atau senilai Rp115 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan semester I-2017 yang hanya Rp84,24 triliun. ★

Kepala BPH Migas Hadiri 27th World Gas Conference



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama dengan rombongan delegasi Indonesia lainnya dalam ajang 27th World Gas Conference di Convention Centre Marriott, WDC, AS (22-29 Juni 2018). Menteri ESDM akan menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertema What Next for The Asia Pasific Gas Market, bersama panelis lainnya, Franxis Fanon (Asisten Sekretaris Biro Sumber Energi AS), Wan Zulkiflee (CEO Petronas), dan Yalan Li (Chairman of Board of Director Beijing Gas Group). Diskusi digelar pada 27 Juni 2018.

Kunjungan ke AS ini juga dimanfaatkan rombongan untuk menghadiri acara lain, seperti dialog antara menteri-menteri energi di negara kawasan APEC dengan CEO perusahaan LNG, pertemuan dengan US-Asean Business Council, menghadiri CSIS-Pertamina Banyan Tree Leadership Forum, serta pertemuan dengan

masyarakat Indonesia untuk menjelaskan perkembangan kinerja sektor minyak dan gas.

WGC atau *The World Gas Conference* sendiri WGC merupakan event tiga tahunan yang diselenggarakan oleh negara yang memegang tampuk presidensi International Gas Union. Di Washington,

acara ini merupakan konferensi ke-27 setelah tiga tahun lalu digelar di Paris, Prancis.

WGC dihadiri oleh pemimpin berpengaruh bidang energi, pengusaha dari berbagai negara, maupun anggota senat dan kongres AS. Diperkirakan 12.000 peserta hadir termasuk 600 pembicara, 600 organisasi dalam 100 sesi diskusi. ★

Monitoring Penyediaan dan Pendistribusian BBM Pasca Idul Fitri 2018

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar dan Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) pasca Idul Fitri 2018 di ASDP Merak, Kamis (21/6/2018).



Rangkaian kegiatan monitoring dimulai dengan melaksanakan rapat bersama. Selanjutnya, rombongan melakukan pengecekan lapangan sarana flometer BBM di ASDP Merak. Lokasi kedua monitoring adalah Depo Stasiun Rangkasbitung,

Lebak, Banten. Komite BPH Migas bersama tim langsung melakukan peninjauan lapangan tangki BBM Depo Stasiun KAI Rangkasbitung, Lebak. ★

Halal Bi Halal Hari Pertama Masuk Kerja Pasca Libur Lebaran

Segenap Komite dan karyawan BPH Migas menghadiri acara Halal Bi Halal di Aula Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (21/6/2018). Acara rutin tahunan bertujuan mempererat silaturahmi dan kekompakan seluruh pegawai BPH Migas agar ke depannya berkinerja lebih baik lagi.



Monitoring Pasca Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Pulau Jawa

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, selaku Ketua Posko Nasional ESDM Idul Fitri 1439 H memimpin Rapat Koordinasi dengan PT Pertamina (Persero), Ditjen Migas, PT PGN, PT AKR, PT PLN (Persero) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/6/2018). Rapat ini membahas ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam menghadapi arus balik pasca Lebaran 2018.



Setelah rapat, Kepala BPH Migas dan rombongan melakukan kunjungan ke Kios Pertamina Rest Area 407 Tol Batang-Semarang, dilanjutkan ke KM 344 Candi Areng Batang. Kepala BPH Migas memastikan distribusi BBM saat arus balik mudik tetap terjamin pasokannya.

Keesokan harinya, Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar bersama Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melaksanakan monitoring pasca hari raya Idul Fitri 1439 H yang bertempat di Pandeglang, Jawa Barat. Pada hari yang sama, Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan bersama dengan Sekretaris BPH Migas Moh. Hidayat serta tim melaksanakan monitoring pasca hari raya Idul Fitri 1439 H bertempat di Kiosk BBM lokasi Tol Surabaya- Mojokerto, rest area KM 678B. ★



Kunjungan ke JIPE

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama tim melakukan kunjungan ke Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) di Gresik, Jawa Timur, Sabtu (16/6/2018).

Kawasan dengan luas 3.000 hektar ini menjadi kawasan terintegrasi terlengkap dengan pelabuhan sekaligus pabrik-pabrik dengan fasilitas yang mumpuni. Salah satunya adalah di kawasan ini direncanakan akan membangun *smelter* PT Freeport. BPH Migas juga meninjau jaringan pipa gas yang ada di kawasan ini terkait dengan pengawasan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT) di Gresik, Jawa Timur. ★



Kunjungan ke TBBM Nilam



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melaksanakan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di TBBM Nilam PT AKR Corporindo, Tbk yang berada di Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/6/2018).

Setelah itu, Kepala BPH Migas dan tim melanjutkan monitoring dan langsung mengunjungi SPBKB Duduk Sampeyan 1026007 milik AKR di Gresik untuk meninjau SPBKB dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setempat pada H+1. ★



Pemantauan BBM Saat Hari-H

Setelah melaksanakan sholat led, Jumat (15/6/2018), Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa terbang ke Pontianak dan memantau kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di ibukota Kalimantan Barat tersebut.



Tim BPH Migas melanjutkan pemantauan stok BBM di Terminal PT AKR Wajok Kalimantan Barat. Data stok di tangki penyimpanan AKR terakhir menunjukkan stok BBM RON 92 sebesar lebih dari 1.100 KL dan BBM Solar lebih dari 12 ribu KL dan cukup untuk memenuhi kebutuhan PSO dan industri umum lebih dari 17 hari mendatang.. ★



Safari Ramadhan ke Tol Fungsional

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan kunjungan lapangan terkait kesiapan sektor energi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Jawa Tengah. Pada Selasa (12/6/2018), Fanshurullah mengecek langsung ketersediaan Premium di SPBU 4450109, Semarang, Jawa Tengah.



Kepala BPH Migas dan tim melanjutkan perjalanan untuk meninjau kios BBM kemasan PT AKR di Rm Barokah Pantura, Kiosk BBM PT AKR Corporindo, Tbk di exit Tol Gringsing, Kendal, Jawa Tengah. Pada hari yang sama, Kepala BPH Migas beserta tim meninjau proyek pembangunan Jembatan Kali Kuto yang sudah dilewati per tanggal 13 Juni 2018. Tim berlanjut mengunjungi kios-kios BBM milik PT Pertamina (Persero) di sepanjang rest area Tol Batang-Semarang. Esok harinya, Kepala BPH Migas beserta tim melakukan safari ramadhan melalui perjalanan darat Semarang-Surabaya guna memastikan ketersediaan BBM di rest area sepanjang ruas tol fungsional Salatiga-Kartasura berlanjut di ruas Tol Solo-Kartosono-Surabaya. ★

Pemantauan BBM di Jawa Barat

Komite BPH Migas M Ibnu Fajar menyusuri SPBU dari Kabupaten Sukabumi sampai Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/6/2018). Didampingi oleh Tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018, kunjungan ini guna meninjau kesiapan sektor energi dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 H.



Dua hari sebelumnya, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama tim Posko Nasional ESDM Tahun 2018 melaksanakan monitoring dan kunjungan lapangan serupa di Bandung, Jawa Barat.

Kepala BPH Migas melakukan kunjungan kerja ke Marketing Branch Jawa Barat PT Pertamina (Persero) dan langsung melaporkan kepada tim Posko Nasional

ESDM melalui sambungan *video conference*. Setelah itu, Kepala BPH Migas mengunjungi Kantor Badan Geologi dan berkoordinasi bersama Kepala Badan Geologi serta langsung melaporkan kegiatannya melalui sambungan *video conference*. Selanjutnya, Kepala BPH Migas dan tim melaksanakan monitoring di SPBU Reborn Premium No. 34 40114 di Bandung.

Laporan tim di lapangan menemukan, SPBU ini melayani pembelian Pertalite dengan memakai dirijen/alat tampung sementara dengan ditujukan untuk dijual kembali secara eceran. Selain itu, SPBU ini pun belum mendistribusikan Premium bagi masyarakat sekitar. Kepala BPH Migas akan menindak secara tegas kepada para pelaku usaha yang tidak menuruti aturan yang telah diberlakukan. ★



Kepala BPH Migas Dampingi Menteri ESDM Pantau Kesiapan BBM di Yogyakarta

Komite BPH Migas Menjadi Narasumber Workshop Kendala Penyaluran BBM

Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar dan M. Lobo Balia menjadi narasumber dalam acara Workshop Mengatasi Kendala Penyaluran BBM di Wilayah Maluku-Papua. Acara ini diselenggarakan di Hotel Fourpoint by Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/6/2018).

Selama bulan Ramadhan, terjadi penurunan kebutuhan BBM dan LPG di wilayah Maluku dan Papua. Kondisi ini disebabkan banyak penduduk yang mudik keluar wilayah itu sehingga menyebabkan turunnya arus kendaraan dan aktivitas masyarakat. ★



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mendampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam lawatannya ke SPBU 44-55518 dan Posko Pengamat Gunung Api, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (7/6). Kepala BPH Migas memastikan Tim Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 berjalan lancar sesuai dengan tugas yang diberikan. "Tim sudah turun sejak 31 Mei hingga 28 Juni nonstop keliling ke seluruh lokasi," kata Fanshurullah.

Tim melibatkan beberapa unit kerja di Kementerian ESDM antara lain BPH Migas, Badan Geologi ESDM, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Migas, PT Pertamina (Persero), PT PGN, PT Pertagas Niaga serta PT PLN.

Tim Posko Nasional ESDM juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjelang dan selesai hari raya Idul Fitri terpenuhi. Menteri ESDM menargetkan sebanyak 2.090 SPBU di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) terdapat BBM Premium. ★



BPH Migas Kebut Distribusi Premium

“Tadi malam (saya cek) dari 571 SPBU, baru 104 lokasi yang jual lagi Premium,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Kantor Pertamina Sumbagsel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/6).

Dia menjelaskan, Pertamina sedang tancap gas mendistribusikan BBM jenis Premium di seluruh wilayah Jamali agar bisa digunakan dalam arus mudik. Fanshurullah menjelaskan, pihaknya harus memastikan ketersediaan distribusi BBM sesuai Undang-Undang Migas. Pasal 8 ayat 4 UU tersebut menyebutkan, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, bukan hanya BBM bersubsidi, tetapi nonsubsidi. ★

Sebanyak 104 SPBU milik PT Pertamina (Persero) di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) menjual bahan bakar minyak (BBM) Jenis Premium. Total, di Jamali terdapat 467 SPBU belum menjual Premium.



MoU Pertukaran Data Konsumsi BBM

BPH Migas menandatangani MoU Pertukaran Data Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Gubernur Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (7/6/2018). Nota kesepahaman pertukaran data konsumsi BBM ini diharapkan dapat mendorong Badan Usaha migas yang beroperasi di Sumsel untuk transparan dalam menyajikan data konsumsi BBM di daerah ini.

“Jika berhasil, ini akan menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia,” tutur Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Griya Agung, Palembang, Sumsel.

Adapun dengan nota kesepahaman ini diharapkan tidak ada lagi perbedaan data dari Badan Usaha migas di Sumsel untuk diberikan kepada BPH Migas dan juga pemerintah daerah (pemda). ★



Buka Puasa Bersama

Segenap pegawai BPH Migas menghadiri Buka Puasa Bersama Keluarga Besar BPH Migas yang diselenggarakan di Masjid Al Hakam BPH Migas, Selasa (5/6/2018).

Selain melaksanakan buka puasa bersama, BPH Migas juga berbagi bersama anak yatim sebagai bentuk rasa Syukur BPH Migas telah diberikan kesempatan untuk berkinerja bagi Indonesia sejauh ini.★



Rapat Kesiapan Posko Nasional ESDM



BPH Migas melakukan rapat koordinasi dengan GM MOR II Palembang serta mengunjungi TBBM Kertapati, Unit Pengatur Beban di Keramasan (PLN), dan Kilang Minyak Pertamina di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (4/6/2018). Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa berharap posko kesiapan satgas dapat berjalan baik sebagaimana sesuai dengan instruksi dari Menteri ESDM untuk menyambut Lebaran tahun ini.

“Kita menyebar ke seluruh Indonesia untuk memastikan posko kesiapan satgas Lebaran ini aman. Di Sumbagsel, *Insha Allah* aman terkendali. Ini adalah tahun kedua BPH Migas ditugaskan oleh Menteri ESDM untuk koordinasi posko,” ujarnya.

Kepala BPH Migas juga menambahkan hal ini sebagai upaya mewujudkan ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Migas Pasal 8 Ayat 2 Nomor 22 Tahun 2001.

Pada hari yang sama, Komite BPH Migas, Ahmad Rizal juga mendampingi Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik DPR RI ke TBBM Kertapati, Palembang. ★

Forum Diskusi Hukum Hilir Migas dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

BPH Migas melaksanakan acara “Forum Diskusi Hukum tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa” yang berlangsung di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/6/2018).

Tujuan dari diselenggarakannya acara konsinyering ini adalah Sebagai media untuk melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan-permasalahan hukum pada kegiatan hilir minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta diharapkan dengan

adanya forum diskusi hukum ini diperoleh masukan masukan yang berguna dalam rangka penyempurnaan regulasi yang terkait dengan kegiatan hilir minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. ★



Sharing Session Mencegah Radikalisme di Sektor ESDM

BPH Migas menggandeng Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Drs. E. Widyo Sunaryo untuk hadir dan memberikan motivasi dengan tema “Mencegah Radikalisme di Sektor ESDM”. *Sharing session* ini merupakan bagian acara *Achievement Motivation* yang diselenggarakan di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dan Komite BPH serta seluruh pegawai. Motivasi oleh Drs. E. Widyo Sunaryo ini diharapkan mendorong semangat pegawai untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. ★



Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur



BPH Migas menggelar Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga secara Nasional yang bertempat di Palembang, Sabtu (19/5/2018). Pada kesempatan ini, hadir Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas Ahmad rizal.



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI".

Sebagaimana diketahui dengan luasnya NKRI, masih banyak terdapat wilayah yang masyarakatnya belum menikmati kemudahan dalam memperoleh BBM yang seharusnya dapat diakses dengan mudah dan dengan harga yang sama di seluruh wilayah NKRI. ★



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id